

**ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP
PENDAPATAN PER KAPITA DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi Pada Kabupaten Daerah Otonomi Baru Di Provinsi Lampung)



Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**

Oleh

**PETI SAHRINTAN PITRI
NPM. 1451010229**

Program Studi : Ekonomi Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H /2018 M**

**ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH TERHADAP
PENDAPATAN PER KAPITA DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

(Studi Pada Kabupaten Daerah Otonomi Baru Di Provinsi Lampung)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam**



Pembimbing I : Ahmad Habibi, S.E., M.E

Pembimbing II : Gustika Nurmalia M.Ek

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H /2018 M**

ABSTRAK

Indonesia merupakan sebuah Negara berkembang yang saat ini terlihat jelas sedang melaksanakan pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek terpenting dari pelaksanaan otonomi daerah saat ini adalah terkait dengan penggabungan dan pembagian daerah yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pemerintah lokal dan masyarakat lokal serta meningkatkan pelayanan kepada publik. Berangkat dari hal tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada perbedaan pendapatan perkapita Kabupaten daerah otonomi baru di Provinsi Lampung sebelum dan sesudah pemekaran wilayah, serta bagaimana dampak pemekaran wilayah Kabupaten daerah otonomi baru di Provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pendapatan per kapita Kabupaten daerah otonomi baru di Provinsi Lampung sebelum dan sesudah pemekaran wilayah, serta bagaimana dampak pemekaran wilayah Kabupaten daerah otonomi baru di Provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi islam. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder dalam priode pengamatan (sebelum pemekaran tahun 2004-2007) dan (setelah pemekaran tahun 2013-2016). Pengumpulan data sekunder menggunakan metode dokumentasi untuk data laporan PDRB perkapita dari BPS Provinsi Lampung, data yang terkumpul dianalisis menggunakan uji beda yaitu Paired Sample T-Test dengan menggunakan SPSS 16.0.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara PDRB Perkapita daerah otonomi baru di Provinsi Lampung sebelum dan sesudah pemekaran wilayah. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan nilai sig. (2-tailed) yang dilakukan menggunakan program SPSS 16.0 yaitu Kabupaten Pringsewu, Mesuji dan Tulang Bawang Barat sig. (2-tailed) = (0,000). Dalam perspektif ekonomi islam menunjukkan perubahan yang cukup baik. Islam menentukan fungsi pokok negara dan pemerintahan dalam bidang ekonomi, yaitu menghapuskan kesulitan ekonomi yang dialami rakyat, memberi kemudahan pada akses pengembangan ekonomi kepada seluruh lapisan rakyat dan menciptakan kemakmuran. Sedangkan Islam menganggap kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat. Al-Qur'an memberikan peringatan terhadap manusia yang melalaikan kemiskinan. Terdapat tiga cara mengatasi kemiskinan yaitu: peningkatan sektor riil dan menghapuskan riba, pembangunan infrastruktur, serta kesehatan dan pendidikan merupakan faktor utama dalam pembangunan ekonomi.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap
Pendapatan Per Kapita Dalam Perspektif Ekonomi
Islam (Studi Pada Kabupaten Daerah Otonomi Baru
Di Provinsi Lampung)**

Nama Mahasiswa : Peti Sahrintan Pitri

NPM : 1451010229

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.**

Bandar Lampung, 29 September 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

**Ahmad Habibi, S.E., M.E
NIP. 197905142003121003**

**Gustika Nurmalia, M.Ek
NIP.**

**Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah**

**Madnasir, S.E., M.S.I
NIP. 197504242002121001**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

**Skripsi dengan judul “ANALISIS DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH
TERHADAP PENDAPATAN PER KAPITA DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM (Studi Pada Kabupaten Daerah Otonomi Baru Di
Provinsi Lampung)”, disusun oleh: Peti Sahrantan Pitri, NPM: 1451010229
Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : Rabu,
17 Oktober 2018**

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang : Budimansyah, M.Kom.I

Sekretaris : Liya Ermawati, S.E., M.S.Ak

Penguji I : Suhendar, SE., M.S.Ak

Penguji II : Gustika Nurmalia, M.Ek

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Bahrudin, M.Ag.

1580824 198903 1 003

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.¹ (Qs. An-Nisa’ : 58)



¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Jumanatul Ali Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, CV Penerbit J-ART : Bandung, h.87

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur terhadap Allah SWT dan dari lubuk hati yang terdalam sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Sebagai tanda bakti cinta tulus kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada orang tuaku tercinta, Ayah (Alm) Ahmad Pahrozi dan Ibuku Yuharlis yang selalu senantiasa berdo'a untuk kesuksesan anaknya, memotivasi saya dengar nasehat-nasehat yang luar biasa, dan sabar menantikan keberhasilanku, sehingga mengantarkanku meraih gelar sarjana.
2. Adikku Agus Setiawan yang sangat aku sayangi, selalu memberikan doa, semangat, dukungan, dan menantikan keberhasilan kakaknya.
3. Keluarga besar Ayah dan Ibu yang selalu memberikan doa, mendukungku, memberikan dorongan moril maupun materil agar aku bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu dan telah mendidikku menjadi mampu berfikir lebih maju, hingga mendapatkan gelar Sarjana. Semoga selalu jaya, maju dan berkualitas.
5. Teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Islam angkatan 2014 yang tak henti-hentinya memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dianugerahi nama oleh Ayah dan Bunda yaitu Peti Sahrantan Pitri. Dilahirkan di Watas, Kec Balik Bukit, Kab Lampung Barat pada tanggal 27 Agustus 1996. Anak pertama dari dua bersaudara atas pasangan Bapak (Alm) Ahmad Pahrozi dan Ibu Yuharlis.

Riwayat pendidikan penulis yang terselesaikan:

1. SD Negeri Padang Dalam Kec Balik Bukit yang terselesaikan pada tahun 2008
2. MTs Negeri Liwa yang terselesaikan pada tahun 2011
3. SMAN 1 Liwa yang terselesaikan pada tahun 2014
4. Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan puji syukur kehadirat Allah SWT serta berkat dorongan dan dukungan dari Ayah dan Ibu, akhirnya penulis mempunyai kesempatan untuk dapat melanjutkan jenjang perguruan tinggi yaitu UIN Raden Intan Lampung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam prodi Ekonomi Islam pada tahun 2014.

Sejak sekolah MTsN hingga SMAN ia aktif berorganisasi (Pramuka, PMR, dan Paskibra) dan hobbynya berorganisasi diteruskan ketika kuliah. Organisasi yang pernah diikuti yaitu Raden Intan Sharia Economic Forum (RISEF) sebagai anggota. Selain itu, penulis juga pernah ikut aktif dalam kegiatan PKPT IPNU IPPNU UIN RIL.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam yang mana telah melimpahkan karunia-nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “*Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pendapatan Per Kapita Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kabupaten Daerah Otonomi Baru Di Provinsi Lampung)*” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam saya limpahkan kepada baginda rasul muhammad SAW dan para sahabat serta pengikut-pengikut setianya.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) jurusan ekonomi islam fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN raden intan lampung guna memperoleh gelar sarjana ekonomi (SE). Dalam bidang ilmu ekonomi islam.

Pada penyusunan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan bantuan dan dukungan selama penulis menempuh masa studi. Secara rinci ungkapan terimah kasih saya sampaikan kepada:

1. Dr. Moh. Baharudin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap masalah-masalah akademik mahasiswa.
2. Madnasir, S.E., M.S.I, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang membimbing kami

selama masa studi hingga pada akhirnya kami dapat menyelesaikan studi S1 di jurusan Ekonomi Islam dengan baik.

3. Ahmad Habibi, S.E., M.E selaku Pembimbing Akademik I dan Gustika Nurmalia M.Ek selaku Pembimbing Akademik II yang telah menyediakan waktu, memberikan kritik, saran dan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan serta memotivasi penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat hingga penulis dalam mendapatkan data dan informasi yang penulis butuhkan sampai terselesaikannya skripsi ini.

5. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung yang telah mengizinkan dan memberikan data kepada penulis sehingga dapat melanjutkan penelitian ini dengan baik.

6. Sahabat-sahabatku Anis, Dewi, Dwi, Eni, Ina, Ike, Juni, Murih, Niar, Noviana, Reva, Rustiana, Ria, Siti, Pixyoriza, dan seluruh teman-teman Ekonomi Islam kelas A angkatan 2014 yang selalu bersama dalam proses belajar, berjuang bersama menghapai proses perkuliahan UTS dan UAS hingga proses skripsi. Serta semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga kita selalu terikat dalam ukhuwah Islamiyah.

Semoga segala amal perbuatan baik kita dibalas oleh Allah SWT, dan apa yang ditulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang lain dan dapat

memberikan kontribusi kepada pihak lain yang terkait. Selanjutnya penulis mengucapkan mohon maaf atas segala khilaf baik perbuatan maupun perkataan, baik yang tidak sengaja maupun disengaja dan kepada Allah kami mohon ampunan.

Demikian pengantar dari kami, Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun penulis harapkan demi perbaikan dan kemajuan bersama. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Aamin.

Wallahu al Muwafiq Ilaa Aqwami at Tharieq

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Bandar Lampung, 29 September 2018

Penulis

Peti Sahrintan Pitri
NPM. 1451010229

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Identifikasih Masalah	13
E. Batasan Masalah	13
E. Rumusan Masalah	14
F. Tujuan Penelitian	14
H. Manfaat Penelitian	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah 16
2. Landasan Hukum/Undang-Undang 21
3. Tujuan Otonomi Daerah.. 25
4. Dampak-Dampak Otonomi Daerah 27

B. Konsep Pemekaran Wilayah

1. Pengertian Pemekaran Wilayah 29
2. Dasar Hukum Pemekaran Wilayah 33
3. Syarat-Syarat Untuk Melakukan Pemekaran..... 34
4. Pemekaran Wilayah 40
5. Pemekaran Wilayah Menurut Perspektif Ekonomi Islam 42

C. Konsep Pendapatan Perkapita

1. Pengertian Pendapatan Perkapita 43
2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Rendahnya
Pendapatan Perkapita 47
3. Upaya Meningkatkan Pendapatan Perkapita 47
4. Hubungan Dampak Pemekaran Wilayah
dengan Pendapatan Perkapita 49
5. Pendapatan Perkapita Menurut Perspektif Ekonomi Islam 50

D. Konsep Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan 52
2. Indikator Kemiskinan 54
3. Macam-Macam Kemiskinan 55
4. Penyebab Kemiskinan 56
5. Hubungan Dampak Pemekaran Wilayah Dengan Kemiskinan 57
6. Kemiskinan Kabupaten DOB di Provinsi Lampung 58

6. Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Islam	67
E. Penelitian-penelitian Terdahulu	70
F. Kerangka Pemikiran	74
G. Hipotesis	75

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian	76
B. Sumber Data.....	77
C. Teknik Pengumpulan Data.....	77
D. Populasi Dan Sampel.....	78
E. Variabel dan definisi operasional.....	79
F. Metode Analisis Data.....	81
1. Statistik Deskriptif.....	81
2. Uji Normalitas Data	82
G. Pengujian Hipotesis	
1. Uji Paired Sample T-Test.....	82

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Hasil Penelitian	
1. Gambaran Umum Provinsi Lampung	84
2. Gambaran Umum Kabupaten Pringsewu	89
3. Gambaran Umum Kabupaten Mesuji	91
4. Gambaran Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat	93
5. Pendapatan Perkapita	94
4. Kemiskinan	95
B. Analisa Data	
1. Hasil Uji Statistik Deskriptif	97

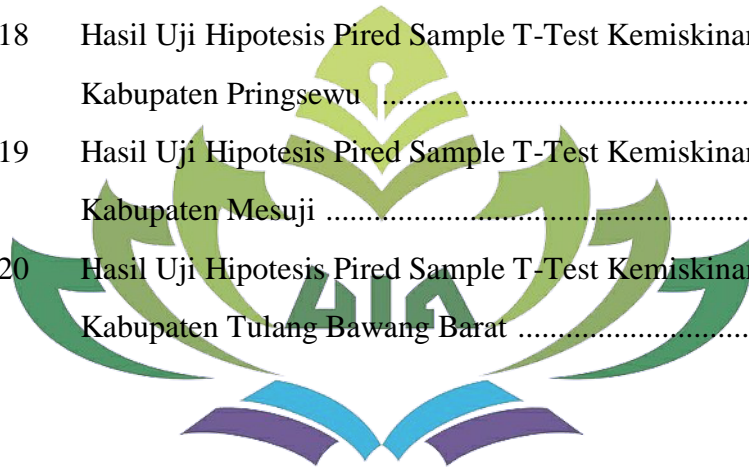
2. Hasil Uji Normalitas	104
C. Pengujian Hipotesis	
1. Paired Sampel T-Test	107
D. Pembahasan	
1. Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap PDRB Perkapita Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Lampung.	112
2. Dampak Pemekaran Wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam	118
 BAB V Kesimpulan dan Saran	
A. Kesimpulan	123
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data PDRB Per Kapita Provinsi Lampung Daerah Otonomi (Tinjauan Ekonomi Regional Daerah Otonomi) Tahun (2004-2007 Sebelum) dan Tahun (2013-2016 Sesudah) (Ribu Rp)	9
Tabel 1.2 Data Penduduk Miskin Provinsi Lampung Tahun (2004-2007 Sebelum) dan Tahun (2013-2016 Sesudah) (Ribu Jiwa)	9
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel	81
Tabel 4.1 Data PDRB Per Kapita Provinsi Lampung Daerah Otonomi (Tinjuan Ekonomi Regional Daerah Otonomi) (2004-2007 Sebelum) dan Tahun (2013-2016 Sesudah) (Ribu Rupiah)	95
Tabel 4.2 Data Penduduk Miskin Provinsi Lampung (2004-2007 Sebelum) dan Tahun (2013-2016 Sesudah) (Ribu Jiwa)	96
Tabel 4.3 Hasil Uji Deskriptif Statistik PDRB Perkapita Kabupaten Pringsewu	98
Tabel 4.4 Hasil Uji Deskriptif Statistik PDRB Perkapita Kabupaten Mesuji	99
Tabel 4.5 Hasil Uji Deskriptif Statistik PDRB Perkapita Kabupaten Tulang Bawang Barat	100
Tabel 4.6 Hasil Uji Deskriptif Statistik Kemiskinan Kabupaten Pringsewu	101
Tabel 4.7 Hasil Uji Deskriptif Statistik Kemiskinan Kabupaten Mesuji	102
Tabel 4.8 Hasil Uji Deskriptif Statistik Kabupaten Tulang Bawang Barat	103
Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas PDRB Perkapita Kabupaten Pringsewu	104
Tabel 4.10 Hasil Uji Normalitas PDRB Perkapita Kabupaten Mesuji	105
Tabel 4.11 Hasil Uji Normalitas PDRB Perkapita Tulang Bawang Barat	105

Tabel 4.12	Hasil Uji Normalitas Kemiskinan Kabupaten Pringsewu	106
Tabel 4.13	Hasil Uji Normalitas Kemiskinan Kabupaten Mesuji	106
Tabel 4.14	Hasil Uji Normalitas Kemiskinan Kabupaten Tulang Bawang Barat	107
Tabel 4.15	Hasil Uji Hipotesis Pired Sample T-Test PDRB Perkapita Kabupaten Pringsewu	108
Tabel 4.16	Hasil Uji Hipotesis Pired Sample T-Test PDRB Perkapita Kabupaten Mesuji	109
Tabel 4.17	Hasil Uji Hipotesis Pired Sample T-Test PDRB Perkapita Kabupaten Tulang Bawang Barat	109
Tabel 4.18	Hasil Uji Hipotesis Pired Sample T-Test Kemiskinan Kabupaten Pringsewu	110
Tabel 4.19	Hasil Uji Hipotesis Pired Sample T-Test Kemiskinan Kabupaten Mesuji	111
Tabel 4.20	Hasil Uji Hipotesis Pired Sample T-Test Kemiskinan Kabupaten Tulang Bawang Barat	112



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	74
---------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

1. PDRB Per Kapita Daerah Otonomi Baru di Provinsi Lampung tahun 2004-2007 dan tahun 2013-2016 (Ribu Rp)
2. Penduduk Miskin Daerah Otonomi Baru di Provinsi Lampung Tahun 2004-2007 dan Tahun 2013-2016 (Ribu Jiwa)
3. PDRB Per Kapita Daerah Otonomi Baru di Provinsi Lampung tahun 2004-2016
4. Kemiskinan Daerah Otonomi Baru di Provinsi Lampung tahun 2004-2016
5. Hasil Uji Deskriptif Statistik PDRB Perkapita Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat
6. Hasil Uji Deskriptif Statistik Kemiskinan Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat
7. Hasil Uji Normalitas PDRB Perkapita Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat
8. Hasil Uji Normalitas Kemiskinan Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat
9. Uji Hipotesis Pired Sample T-Test PDRB Perkapita Kabupaten Pringsewu, Perkapita Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat
10. Hasil Uji Hipotesis Pired Sample T-Test Kemiskinan Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari salah penafsiran mengenai judul skripsi dan memudahkan pembaca dalam mengkaji isinya, serta membahas ruang lingkup penelitian, maka diperlukan adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. Adapun judul skripsi ini “Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pendapatan Perkapita dan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kabupaten Daerah Otonomi Baru Di Provinsi Lampung)”. Istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan atas bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan memahami arti keseluruhan.¹

2. Dampak

Dampak adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.²

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pembangunan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 32

² Kbbi.web.id/dampak, diakses pada 2 Februari 2018

3. Pemekaran Wilayah

Pemekaran daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. Dalam hal ini pemekaran ini dapat berupa pembentukan daerah yaitu pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota. Penghapusan daerah yaitu pencabutan status sebagai daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota dan penggabungan daerah yang merupakan penyatuan daerah yang dihapus ke dalam daerah lain yang bersanding.³

4. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan Per Kapita adalah pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk.⁴

5. Perspektif

Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.⁵

6. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah tata aturan yang berkaitan dengan cara memproduksi, distribusi dan konsumsi serta kegiatan lain dalam rangka

³ Bismar Arianto dan Afrizal, Fenomena Pemekaran Daerah di Provinsi Kepulauan Riau (Studi Pemekaran Daerah di Kabupaten Bintan), *Jurnal Selat*, Vol. 1 No. 1 (Oktober 2013), h. 33

⁴ KBBI V di akses pada 3 Februari 2018

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h.1062

dalam mencari ma'isyah (penghidupan individual maupun kelompok/negara) sesuai dengan ajaran islam (Al-Qur'an dan Al-Hadist).⁶

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Dengan adanya pemekaran daerah, maka akses dan mobilitas kehidupan semakin terbuka dan meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

2. Alasan Subjektif

Peneliti optimis bahwa penelitian ini dapat diselesaikan dengan didukung oleh tersedianya data-data, buku-buku, koran dan berbagai *literature* yang di butuhkan dalam penelitian sebagai referensi. Selain itu, judul yang peneliti ajukan sesuai dengan jurusan peneliti yaitu Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah Negara berkembang yang saat ini terlihat jelas sedang melaksanakan pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan. Pembangunan dapat diartikan sebagai gagasan untuk mewujudkan sesuatu yang dicita-citakan. Di mana gagasan tersebut lahir dalam bentuk usaha untuk mengarahkan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan, serta pembangunan bangsa.⁷ Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan

⁶ Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan Makro*, (Yogyakarta : Graha Ilmu), h.3

⁷ Saeful Anwar, *Pemekaran Wilayah Bine Selatan*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar 2014), h.1

bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Daerah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berhubungan dengan pemberian otonomi daerah yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat.⁸

Menurut Marnis, di negara berkembang peranan pemerintah bukan saja perlu untuk menstabilkan kegiatan ekonomi tetapi juga untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Membangun infrastruktur yang lebih baik, menciptakan suasana kegiatan usaha yang memberikan prospek keuntungan yang baik dan memberikan insentif untuk kegiatan investasi baru merupakan beberapa bentuk usaha pemerintah yang penting perannya dalam upaya untuk mempercepat tingkat pertumbuhan ekonomi.⁹ Meningkatnya kemiskinan dan pengangguran yang terjadi akhir-akhir ini mengingatkan untuk mengevaluasi cocok tidaknya strategi pembangunan ekonomi yang diterapkan saat ini, apakah menggunakan pendekatan ekonomi kapitalis (industrialisasi) yang padat modal atau pendekatan ekonomi kerakyatan (pertanian) yang padat karya. Ekonomi suatu daerah akan kokoh kalau pelaku ekonomi dilakukan oleh sebanyak-banyaknya masyarakat.¹⁰

⁸ Eko Oktah Supri Lariky, *Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Bangkinang Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau Pekanbaru 2012) h.1

⁹ Marnis, *Pengantar Bisnis*, (Pekanbaru : UNRIPress, 2007), h. 69

¹⁰ Ina Primiana, *Menggerakkan Sektor Rill UKM & Industri*, (Bandung, Alfabeta, 2009),h.63

Pada Undang-undang Dasar 1945 terkandung makna Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah itu sendiri di dalam penyelenggaraannya di pandang perlu lebih menekankan pada prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah, diantaranya faktor-faktor geografis yang mencakup potensi daerah (sumber daya alam), Luas Daerah, jumlah penduduk, dan kondisi fasilitas-fasilitas masyarakat umum. Serta hal-hal yang menjadi pertimbangan untuk terselenggaranya otonomi daerah, dalam hal ini pemekaran wilayah.¹¹

Pentingnya pemekaran wilayah pada hakekatnya adalah upaya menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pembangunan dan pengembangan otonomi dalam masa transisi ini adalah mengembangkan prakasa dari dalam, menumbuhkan kekuatan-kekuatan baru dari masyarakat, sehingga intervensi dari luar termasuk dari pemerintah terhadap masyarakat harus merupakan proses pemberdayaan dalam rangka mengelola pembangunan untuk mengantisipasi perubahan dan peluang yang lebih luas. Secara esensial sebenarnya dalam menyelenggarakan desentralisasi terdapat dua elemen penting yang sangat penting yang saling berkaitan yaitu pembentukan daerah otonomi dan penyerahan kekuasaan

¹¹ *Ibid* Saeful Anwar

secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan menangani urusan pemerintah tertentu yang diserahkan.¹²

Konsep otonomi daerah pada hakekatnya mengandung arti adanya kebebasan daerah untuk mengambil keputusan baik politik maupun administratif. Oleh karena itu, kemandirian daerah merupakan suatu hal yang penting, tidak boleh ada intervensi dari pemerintah pusat. Krtidakmandirian daerah berarti ketergantungan daerah pada pusat. Dengan demikian hal yang menyertai pelaksanaan otonomi daerah adalah pemekaran wilayah. Sistem pemerintahan daerah di Indonesia menurut konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi pla dalam daerah yang lebih kecil di daerah-daerah yang bersifat otonom atau bersifat daerah administratif.¹³ Semangat otonomi di Indonesia tentu saja memberikan dampak yang sangat luas. Salah satu nya dampak dari hal ini adalah banyaknya daerah yang ingin melakukan pemekaran daerahnya.¹⁴

Pemekaran daerah adalah salah satu bentuk pembentukan daerah dengan cara memecahkan satu wilayah menjadi beberapa wilayah yang sesuai dengan ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pemekaran wilayah. Pemekaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, bahwa

¹² Meilia Lovita, *Dampak Pemekaran Kabupaten Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Lampung Barat*, (Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung), h. 1-2

¹³ Siswanto Sunamo, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) h.13

¹⁴ Hari Subamo, *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah Memadu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) h.190

pemekaran daerah berupa pemecahan daerah Provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Pasal 32 ayat (2) mengatur pemekaran daerah dilakukan melalui tahapan daerah persiapan provinsi atau daerah persiapan kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 32 ayat (3), bahwa pembentukan daerah persiapan harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Pemekaran wilayah dilakukan dengan tujuan untuk:¹⁵

- a. Mensejahterakan rakyat melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas
- b. Penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada publik

Pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rantang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan.¹⁶ Pemekaran wilayah bertujuan untuk mengurangi kemiskinan. Menurut Sen kemiskinan

¹⁵ Yusnani Hasyimzoem, dkk, *Hukum Daerah*, (Malang CV. Cita Intrans Selaras Wisma Kalimetro, 2016) h. vii

¹⁶ Andi Rakasiwi, Dampak Pemekaran Terhadap Pembangunan Daerah Di Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2010-2012, *Jom Fisip*, Vol.1 No.2 (Oktober 2014), h. 1-2

lebih terkait pada ketidakmampuan untuk mencapai standar hidup tersebut dari pada apakah standar hidup tersebut tercapai atau tidak.¹⁷

Beberapa daerah terlihat tugas pemerintah maupun proses pembangunan terasa semakin berat, maka dalam mengantisipasi masalah tersebut pemerintah pusat perlu mempersempit jangkauan pengendalian dan mengusahakan efisiensi pelaksanaan pembangunan dengan cara melakukan pemekaran di beberapa daerah kabupaten dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, potensi ekonomi daerah serta faktor lainnya. Seperti halnya di atas bahwa pemekaran daerah erat kaitannya dengan pembangunan. Tantangan utama pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan. Terutama di daerah-daerah yang terbelakang, kualitas hidup yang lebih baik memang mensyaratkan adanya pendapatan yang lebih tinggi sehingga semakin tinggi pendapatan maka kesejahteraan akan tercapai.¹⁸

Purbayu Budi Santoso dan Muliawan Hamdani menyatakan bahwa ukuran kesejahteraan penduduk suatu negara biasanya juga didasarkan atas besarnya jumlah pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita merupakan bentuk rata-rata yang diperoleh dari pembagian jumlah produk nasional bruto oleh jumlah keseluruhan penduduk. Semakin besar nilai pendapatan perkapita, diasumsikan bahwa anggota masyarakat suatu negara makin sejahtera dan pembangunan perekonomian dinilai makin berhasil.¹⁹

¹⁷ Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, *Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin*, Bogor, h.25 dan 27

¹⁸ Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, (Jakarta : Erlangga : 1997 Edisi Keenam, Jilid Pertama, h.19)

¹⁹ *Ibid*, h.70

Kabupaten daerah otonomi baru di Provinsi Lampung Pada tahun 2004-2007 sebelum pemekaran dan tahun 2013-2016 sesudah pemekaran rata-rata laju pendapatan perkapita selama delapan tahun terakhir relatif tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
PDRB Per Kapita DOB Di Provinsi Lampung Tahun 2004-2007
dan Tahun 2013-2016 (Ribu Rp)

No	Tahun	DOB Pringsewu	DOB Mesuji	DOB Tulang Bawang Barat
1.	2004	3.772,88	6.121,94	6.121,94
2.	2005	4.235,95	7.182,23	7.182,23
3.	2006	4.845,36	8.442,77	8.442,77
4.	2007	5.757,90	10.224,39	10.224,39
	2008	Pemekaran Wilayah		
5.	2013	17.027,82	30.251,79	25.563,76
6.	2014	19.211,78	34.031,78	28.237,50
7.	2015	20.905,44	37.260,48	30.647,31
8.	2016	22.780,22	41.209,04	33.868,64

Sumber : *Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 2004-2016*

Tabel diatas dapat dilihat bahwasannya pada 8 tahun terakhir, pada tahun 2013 sesudah pemekaran wilayah tingkat pendapatan PDRB perkapita Kabupaten daerah otonomi baru di Provinsi Lampung relatif tinggi. Tingkat tertinggi terjadi ditahun 2016 dimana Kabupaten Pringsewu tingkat PDRB perkapita mencapai Rp. 22,78 juta, Kabupaten Mesuji mencapai Rp. 41,20 juta, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat mencapai Rp. 33,86 juta. Capaian pendapatan perkapita Daerah Otonomi Baru di Provinsi Lampung memang memiliki kecenderungan meningkat absolut. Capaian ini menjadi tampak buruk mengingat berbagai dimensi pembangunan Daerah lainnya justru menunjukkan kinerja yang cukup impresif, seperti kenaikan jumlah penduduk miskin.

Tabel 1.2
Penduduk Miskin DOB Di Provinsi Lampung Tahun 2004-2007
dan Tahun 2013-2016 (Ribu Jiwa)

No	Tahun	DOB Pringsewu	DOB Mesuji	DOB Tulang Bawang Barat
1.	2004	-	-	-
2.	2005	167.30	122	122
3.	2006	181	106.10	106.10
4.	2007	188.20	103.60	103.60
	2008	Pemekaran Wilayah		
5.	2013	37.31	11.23	16.43
6.	2014	37.77	12.79	18.73
7.	2015	45.60	16	21.80
8.	2016	45.72	15.74	22.39

Sumber : *Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 2004-2016*

Tabel diatas dapat dilihat bahwasannya sebelum pemekaran wilayah tahun 2007 jumlah penduduk miskin Kabupaten Pringsewu sebesar 188.20 ribu jiwa, Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat sebesar 103.60 ribu jiwa. Namun setelah banyak dilakukan pemekaran keadaan ditahun 2016 terjadi penurunan di Kabupaten Pringsewu sebesar 45.72 ribu jiwa, Kabupaten Mesuji sebesar 15.74 ribu jiwa dan Tulang Bawang Barat sebesar 22.39 ribu jiwa. Dari analisis di atas maka bahwasannya tingkat kemiskinan Kabupaten daerah otonomi baru di Provinsi Lampung sangat fluktuatif dari tahun ke tahun.

Islam memandang kemiskinan merupakan salah satu hal yang mampu membahayakan akhlak, keluarga dan juga masyarakat.²⁰ Kemiskinan akan menyebabkan kerukunan antara penduduk kaya dengan penduduk miskin. Masalah ini salah satu yang menyebabkan seseorang masuk kedalam kekufuran.

²⁰ Nurul Huda, Dkk, *Op.Cit* h.24

Rasulullah SAW. Bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud.²¹

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا

Artinya : “Dari Anas bin Malik r.a berkata : Rasulullah SAW bersabda kekafiran mendekati kekufuran.

Menurut Manawy antara kekafiran dan kekufuran mempunyai keterikatan yang sangat kuat, karena kekufuran merupakan satu langkah menuju kekafiran.²² Kemiskinan akan menimbulkan iri dengki orang miskin dengan orang kaya, sedangkan iri dengki mampu menyapakan kebaikan.

Luas wilayah Provinsi lampung sebesar 3,5 juta ha (1,84 persen dari wilayah Indonesia). Pemekaran wilayah lampung berlangsung sejak tahun 1991. Awalnya, Provinsi Lampung hanya terdiri dari empat kabupaten/kota. Berdasarkan UU No.6 tahun 1991 terbentuk Kabupaten Lampung Barat, yang merupakan pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Utara sehingga Lampung memiliki lima kabupaten/kota. Tahun 1997 Lampung dimekarkan lagi menjadi tujuh kabupaten/kota dengan penambahan kabupaten Tanggamus dan Tulang Bawang.

Berdasarkan UU No. 12 tahun 1999 kabupaten/kota Provinsi Lampung kembali dimekarkan lagi menjadi sepuluh kabupaten/kota, dengan penambahan Kabupaten Lampung Timur, Way Kanan, dan Kota Metro. Tahun 2007 dibentuk Kabupaten Pesawaran yang merupakan hasil pemekaran

²¹ *Ibid*

²² *Ibid* h.25

dari Kabupaten Lampung Selatan (UU No.33 tahun 2007). Pada tahun 2008 dan Kabupaten Mesuji dan Pringsewu berdasarkan UU No. 48 Tahun 2008 dan Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan UU No. 49 Tahun 2008. Dan terakhir berdasarkan UU No. 22 Tahun 2012 dibentuk kembali Kabupaten Pesisir Barat, sehingga pada saat ini Provinsi Lampung terdiri dari 13 kabupaten dan dua kota.²³

Beranjak pada berbagai kajian empiris dan kondisi faktual di atas maka menarik sekali untuk mengangkat suatu isi bagaimana sebelumnya dampak dari pemekaran daerah tersebut bagi perekonomian Provinsi Lampung terutama jika dilihat pada indikator-indikator kesejahteraan masyarakat.²⁴ Oleh karena itu, Penelitian ini berjudul ***“Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pendapatan Per Kapita Dan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kabupaten Daerah Otonomi Baru Di Provinsi Lampung)”***.

²³ Statistik Daerah Provinsi Lampung 2016 “(Online), tersedia di <https://lampung.bps.go.id/publication/2016/09/26/a7cb0649e3296e50a1727ddd/satistik-daerah-provinsi-lampung-2016.html>”

²⁴ Ida Ayu Purba Riani, Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pendapatan Per Kapita, Kemiskinan Dan Ketimpangan Antarwilayah di provinsi Papua, *Jurnal Bumi Lestari*, Volume 12 No. 1 (Februari 2012), h.137-148

D. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. PDRB perkapita daerah otonomi baru (Kabupaten Pringsewu, Mesuji dan Tulang Bawang Barat) sebelum dan sesudah pemekaran wilayah mengalami kenaikan di tiap tahun namun capaian tersebut masih jauh dari yang di targetkan. Kemiskinan daerah otonomi baru (Kabupaten Pringsewu, Mesuji dan Tulang Bawang Barat) sebelum dan sesudah pemekaran wilayah bersifat fluktuatif sehingga dibutuhkan solusi untuk menurunkan angka kemiskinan salah satunya dengan adanya pemekaran wilayah.
2. Pemerintah mempunyai peran dalam mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah.
3. Manusia berperan penting dalam suatu pembangunan dan di pandang sebagai subjek dalam pembangunan.

E. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya melihat perbedaan PDRB perkapita dan Kemiskinan daerah otonomi baru (Kabupaten Pringsewu, Mesuji dan Tulang Bawang Barat) sebelum dan sesudah pemekaran wilayah yang terjadi di Provinsi Lampung sejak tahun 2004-2007 dan tahun 2013-2016, dimana Provinsi Lampung dalam 8 tahun terakhir telah membagi kewenangan administratif

dari satu wilayah menjadi dua atau beberapa wilayah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skala nasional yang telah di update di website resmi BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Lampung.

F. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian antara lain:

1. Apakah ada perbedaan pendapatan perkapita Kabupaten daerah otonomi baru di Provinsi Lampung sebelum dan sesudah pemekaran wilayah?
2. Bagaimana dampak pemekaran wilayah Kabupaten daerah otonomi baru di Provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi islam?

G. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pendapatan per kapita Kabupaten daerah otonomi baru di Provinsi Lampung sebelum dan sesudah pemekaran wilayah.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak pemekaran wilayah Kabupaten daerah otonomi baru di Provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi islam.

H. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti

Bagi penulis, penelitian ini akan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih dalam mengenai ekonomi islam. Penelitian ini juga akan menambah pengetahuan mengenai perbedaan pendapatan perkapita dan kemiskinan Kabupaten daerah otonomi baru sebelum dan sesudah pemekaran wilayah yang terjadi di Provinsi Lampung sejak tahun 2004-2007 dan tahun 2013-2016 dalam pandangan ekonomi islam.

2. Bagi Akademik

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan kepada mahasiswa, terlebih lagi dalam memahami kebijakan pemekaran wilayah, sekaligus mengetahui manfaat maupun dampak dari adanya kebijakan tersebut.

3. Bagi pemerintah

Bagi pemerintah Kabupaten Daerah Otonomi Baru di Provinsi agar menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan otonomi daerah baik penetapan peraturan daerah yang berhubungan dengan upaya peningkatan pendapatan per kapita dan penurunan kemiskinan maupun peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja Pemerintah Kota.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu *autos*, *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti peraturan. Oleh karena itu, secara harafiah otonomi berarti peraturan sendiri atau undang-undang sendiri, yang selanjutnya berkembang menjadi pemerintahan sendiri.¹ Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Undang-undang No 23 Tahun 2014 dikatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, kewenangan, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang di maksud urusan pemerintahan yaitu adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh

¹ Ny. Arie Sukanti Hutagalung, Markus Gunawan, *Kewenangan Pemerintahan Di Bidang Pertahanan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h.99

² HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), h.76

kementrian negara dan penyelenggara pemerintah daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Pengertian otonomi dalam makna sempit dapat diartikan sebagai mandiri. Sedangkan dalam makna yang lebih luas diartikan sebagai berdaya. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.³

Otonomi daerah merupakan langkah strategis yang diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, di samping menciptakan keseimbangan pembangunan antardaerah di Indonesia. Pembangunan daerah tak akan datang dan terjadi dengan begitu saja. Pembangunan daerah baru akan berjalan kalau sejumlah prasyarat dapat dipenuhi antara lain: fasilitas, pemerintah daerah harus kreatif, politik local yang stabil, pemerintahan daerah harus komunikatif dengan LSM/NGO, terutama dalam bidang perburuhan dan lingkungan hidup.⁴

Terdapat dua komponen utama pengertian otonomi, yaitu *pertama*, komponen wewenang *menetapkan* dan *melaksanakan* kebijakan sebagai komponen yang mengacu pada konsep “pemerintahan” yang terdapat dalam pengertian otonomi. *Kedua* komponen kemandirian sebagai komponen yang mengacu pada kata-kata. “oleh, dari dan untuk rakyat”.⁵

Selain itu, terdapat pula lembaga-lembaga pemerintahan yang secara

³ A. Ubaedillah, dkk, *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Indonesia Center For Civic Education, 2000), h.170

⁴ Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h.155

⁵ Ny.Arie Sukanti Hatagalung dan Markus Gunawan, *Op.Cit.*, h.101

formal di luar pemerintahan pusat sebagai pengembangan dan pelaksanaan wewenang penetapan kebijakan yang tertuang dalam peraturan daerah.⁶

Sedangkan daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain: menumbuhkembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.⁷

Di Negara kesatuan otonomi daerah lebih terbatas dari pada di Negara yang berbentuk federasi. Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di Negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa unsure yang dipegang oleh Pemerintahan pusat seperti:

1. Hubungan Luar Negeri
2. Pengadilan
3. Moneter dan Keuangan
4. Pertahanan dan Keamanan.⁸

Didalam literature pemerintahan dikenal 3 sistem otonomi:

⁶ *Ibid*, h.102

⁷ HAW. Widjaja, *Op.Cit.*, h.76

⁸ Winarna Surya Adisubrata, *Otonomi Daerah Di Era Reformasi*, (yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP), 1999), h.1

a. Otonomi Formil

Otonomi Formil adalah suatu sistem otonomi dimana yang diatur adalah kewenangan-kewenangan pemerintahan pusat yang dipegang oleh pemerintahan pusat seperti: pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, peradilan dan kewenangan lainnya. Sedangkan kewenangan daerah otonom adalah kewenangan yang diluar kewenangan pemerintahan pusat tersebut.

b. Otonomi Materil

Otonomi Materil adalah kewenangan-kewenangan daerah otonom yang dilimpahkan oleh eksplisit disebutkan satu persatu (biasanya diatur dalam Undang-undang pembentukan Daerah Otonom).

c. Otonomi Ril

Otonomi Ril adalah kewenangan-kewenangan daerah otonomi yang dilimpahkan oleh pemerintahan pusat disesuaikan dengan kemampuan nyata dari daerah otonom yang bersangkutan.⁹

Visi otonomi daerah itu dapat dirumuskan dalam tiga ruang lingkup interaksinya yang utama : politik, ekonomi, serta social dan budaya.¹⁰ Berdasarkan visi ini, maka konsep dasar otonomi daerah yang kemudian melandasi lahirnya UU No.22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999, merangkum hal-hal berikut ini:

- 1) Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan domestik kepada daerah

⁹ *Ibid*, h.2

¹⁰ Azyumardi Azra, *Demokrasi hak asasi manusia & Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Media, 2000), h.156

- 2) Penguat peran DPRD sebagai representasi rakyat local dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah
- 3) Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur berkualitas tinggi dengan tingkat akseptabilitas yang tinggi pula
- 4) Peningkatan efektifitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif
- 5) Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah
- 6) Pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah, pemberian keleluasaan kepada daerah dan optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat.¹¹

Otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia bersifat luas, nyata, dan bertanggung jawab. Disebut luas karena kewenangan sisa justru berada pada pemerintahan pusat. Disebut nyata karena kewenangannya yang diselenggarakan itu menyangkut yang diperlukan, tumbuh dan hidup, dan berkembang di daerah dan disebut bertanggung jawab karena kewenangan yang diserahkan itu harus diselenggarakan demi pencapaian tujuan otonomi daerah, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah.¹² Dengan otonomi ini terbuka kesempatan bagi pemerintahan daerah secara langsung membangun kemitraan dengan

¹¹ Winarna Surya Adisubrata, *Op.Cit.*, h.157

¹² *Ibid*, h.158

public dan pihak swasta daerah yang bersangkutan dalam berbagai bidang.¹³

2. Landasan Hukum/Undang-Undang

Peraturan perundang-undangan yang pertama kali yang mengatur tentang pemerintahan daerah pasca proklamasi kemerdekaan adalah UU No.1 Tahun 1945. Ditetapkannya undang-undang ini merupakan hasil dari berbagai pertimbangan kolonial. Undang-undang ini menekankan aspek cita-cita kedaulatan rakyat melalui pengaturan pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Daerah.¹⁴

Prinsip otonomi daerah sebenarnya telah diterapkan jauh sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Beberapa Undang-undang yang mendahului Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 antara lain Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Undang-undang Pokok tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah.¹⁵

Sebagai contoh menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, otonomi daerah dilaksanakan secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab ini dalam tahap implementasinya lebih berkonotasi hak dari pada kewajiban,

¹³ HAW Widjaja, *Op,Cit.*, h.77

¹⁴ Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra, *Op,Cit.*, h.141

¹⁵ Ny. Arie Sukanti Hutagalung, Markus Gunawan, *Op,Cit.*, h.106

dimana banyak memerlukan koordinasi dengan pemerintahan pusat sehingga muncul kesan sentralistik.¹⁶

Berbeda dengan hal ini, undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan kota berdasarkan atas asas desentralisasi dalam upaya mewujudkan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, konsep otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 akhirnya justru memunculkan “raja-raja kecil” di daerah sehingga mendesak dilakukannya revisi terhadap undang-undang ini.¹⁷

Saat ini, prinsip otonomi daerah yang digunakan adalah berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menekankan perwujudan otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keseimbangan hubungan antarpemerintah. Dengan kata lain, prinsip otonomi saat ini berdasarkan atas asas desentralisasi berkeselimbangan.¹⁸

Penjelasan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi :

a) Dasar Pemikiran

- 1) Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk

¹⁶ *Ibid*, h.107

¹⁷ *Ibid*, h.108

¹⁸ *Ibid*, h.109

menyelenggarakan Otonomi Daerah. Karena itu pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, antara lain, menyatakan bahwa pembagian Daerah di Indonesia atas Dasar dan Kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang.¹⁹

- 2) Undang-undang ini disebut Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah karena undang-undang ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi.²⁰
- 3) Dengan memperhatikan pengalaman penyelenggaraan Otonomi Daerah pada masa lampau yang menganut prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan penekanan pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban dari pada hak, maka dalam undang-undang ini pemberian kewenangan otonomi kepada Daerah Kabupaten dan daerah kota didasarkan kepada asas desentralisasi saja dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.
- 4) Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintahan.

¹⁹ Winarna Surya Adisubrata, *Op,Cit.*, h.99

²⁰ *Ibid*, h.100

b) Pembagaian Daerah

Isi dan jiwa yang terkandung dalam pasal 18 Undang-undang Dasar 1948 beserta penjelasannya menjadi pedoman dalam penyusunan undang-undang ini dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

- (1) Sistem ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan prinsip pembagian kewenangan berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.²¹
- (2) Pembagian Daerah di luar Daerah Provinsi dibagi habis ke dalam Daerah otonom.
- (3) Kecamatan yang menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 sebagai Wilayah Administrasi dalam rangka dekonsentrasi, menurut undang-undang ini kedudukannya diubah menjadi perangkat Daerah Kabupaten atau Daerah kota.

c) Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu.

- (1) Asas tugas pembantu yang dapat dilaksanakan di Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, Daerah kota dan desa.²²
- (2) Susunan Pemerintahan Daerah dan Hak DPRD

Susunan Pemerintahan Daerah Otonomi meliputi DPRD dan Pemerintah Daerah:

²¹ *Ibid*, h.104

²² *Ibid*, h.105

(a) Kepala Daerah

Untuk menjadi Kepala Daerah, seseorang diharuskan memenuhi persyaratan tertentu yang intinya agar Kepala Daerah selalu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki etika dan moral, berpengetahuan, dan berkemampuan sebagai pimpinan pemerintahan.

(b) Pertanggung jawaban Kepala Daerah

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban Pemerintahan Daerah, Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD Provinsi, sedangkan dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintahan, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

3. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah antara lain adalah membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan daerah. Dengan demikian pusat kesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat daripadanya. Pada saat yang sama pemerintahan pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro (luas atau yang bersifat umum dan mendasar) nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak, dengan desentralisasi daerah akan mengalami proses pemberdayaa yang optimal. Kemampuan prakasa dan kreativitas pemerintahan daerah akan terpacu, sehingga kemampuannya dalam mengatasi berbagai masaah yang terjadi di daerah akan semakin kuat.

Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik
- b. Pengembangan kehidupan demokratis
- c. Keadilan
- d. Pemerataan
- e. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antara daerah dalam rangka keutuhan NKRI
- f. Mendorong untuk memberdayakan masyarakat
- g. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Secara konseptual, Indonesia dilandasi oleh tiga tujuan utama yaitu: tujuan politik, tujuan administratif dan tujuan ekonomi. Hal yang ingin diwujudkan melalui tujuan politik dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perwujudan tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antar pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan, serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Sedangkan tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya

peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dari ketiga tujuan konseptual di atas, dapat dikatakan apabila pemerintah pusat mampu dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi maka terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

4. Dampak - Dampak Otonomi Daerah

Dampak-dampak otonomi daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Dampak sosial kultural

Dari dimensi sosial, politik dan kultural, baik dikatakan bahwa pemekaran daerah mempunyai beberapa implikasi positif, seperti pengakuan sosial, politik dan kultur terhadap masyarakat daerah. Melalui kebijakan pemekaran, sebuah entitas masyarakat yang mempunyai sejarah kohesivitas dan kebesaran yang panjang, kemudian memperoleh pengakuan setelah dimekarkan sebagai daerah otonom baru. Pengakuan ini memberikan kontribusi positif terhadap keputusan masyarakat, dukungan daerah terhadap pemerintahan nasional, serta manajemen konflik antar kelompok atau golongan dalam masyarakat.

b. Dampak pada Pelayanan Publik

Dari dimensi pelayanan publik, pemekaran daerah memperpendek jarak geografis antara pemukiman penduduk dengan sentra pelayanan, terutama ibu kota pemerintahan daerah. Pemekaran juga mempersempit rentang kendali antara pemerintahan daerah dengan

unit pemerintahan dibawahnya. Pemekaran juga memungkinkan untuk menghadirkan jenis-jenis pelayanan baru seperti pelayanan listri, telpon, serta fasilitas urban lainnya, terutama diwilayah ibukota daerah pemekaran. Dapat dikatakan bahwa pemekaran wilayah dipandang sebagai terobosan untuk mempercepat pelayanan publik yang baik bagi masyarakat.

c. Dampak Bagi Pembangunan Ekonomi

Pasca terbentuknya DOB terdapat peluang yang besar bagi akselerasi pembangunan ekonomi diwilayah yang baru diberi status sebagai daerah otonomi dengan pemerintahan sendiri. Bukan hanya infrastruktur pemerintah yang terbangun, tetapi juga infrastruktur fisik yang menyertainya, seperti infrastruktur jalan, transportasi, komunikasi dan sejenisnya. Selain itu, kehadiran pemerintahan dengan daerah otonomi baru juga memungkinkan lahirnya infrastruktur kebijakan pembangunan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah otonomi baru. Semua infrastruktur ini membuka peluang yang lebih besar bagi wilayah hasil pemekaran unntuk mengaklerasi pembangunan ekonomi. Maka dapat dikatakan kebijakan pembangunan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d. Dampak pada Pertahanan, Keamanan dan Integrasi Nasional.

Pembentukan DOB bagi beberapa masyarakat pedalaman dan masyarakat di wilayah perbatasan dengan negara lain, merupakan isu politik nasional yang penting. Bagi masyarakat tersebut, bisa jadi

mereka tidak pernah melihat dan merasakan kehadiran Indonesia, baik dalam bentuk simbol pemerintahan, politis, birokrasi dan bahkan kantor pemerintahan.²³

B. Konsep Pemekaran Wilayah

1. Pengertian Pemekaran Wilayah

Pemekaran adalah sesuatu bagian yang utuh atau suatu kesatuan yang di bagi atau dipisah menjadi beberapa bagian yang berdiri sendiri. Jadi dengan demikian daerah/wilayah pemekaran adalah suatu daerah/wilayah yang sebelumnya satu kesatuan yang utuh yang kemudian dibagi atau demekarkan menjadi beberapa bagian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.²⁴ Pemekaran daerah adalah salah satu bentuk pembentukan daerah dengan cara memecahkan satu wilayah menjadi beberapa wilayah yang sesuai dengan ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pemekaran wilayah. Dilakukan dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada publik.²⁵

Pemekaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu pemekaran daerah berupa Pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi

²³ Khalid, T.M, "Otonomi Daerah: Tujuan Pemekaran dan penggabungan Daerah". (On-Line) tersedia di [Http://tengkumahesakhalid.blogspot.com](http://tengkumahesakhalid.blogspot.com).2012, diakses tanggal 05-04-2018 pukul 11:19

²⁴ W.J.S poerwardarminta, *Kamus Besar Bahasa indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h.478

²⁵ Yusnani Hasyimzoem, dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Malang: CV. Cita Intrans Selaras Wisma Kalimetro, 2016), h.31

dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1 (satu) daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Pamudji mengatakan bahwa dalam rangka pembentukan suatu daerah atau wilayah pemekaran diperlukan adanya suatu ukuran sebesar dasar penetapan. Pembentukan dan pemekaran wilayah yang harus didasarkan atas pembagian-pembagian yang bersifat objektif dengan memperhatikan segi pembiayaan sumber daya manusia serta sarana penunjang lainnya.²⁶

HR. Makagansa istilah pemekaran lebih cocok untuk mengekspresikan proses terjadinya daerah-daerah baru yang tidak lain adalah proses pemisahan diri dari suatu bagian wilayah tertentu dari sebuah daerah otonomi yang sudah ada dengan niat hendak mewujudkan status administrasi baru daerah otonom.²⁷

Sementara itu, tujuan pemekaran daerah pada Pasal 2 PP No 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, dinyatakan bahwa tujuan dari pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi

²⁶ Pemekaran Wilayah, (On-Line) tersedia di [Knowledgeisfree.blogspot.co.id/makalah-pengertian – pemekaran - wilayah](http://Knowledgeisfree.blogspot.co.id/makalah-pengertian-pemekaran-wilayah). Diakses (jum'at, 05 April 2018 : 21:42)

²⁷ Bismir Arianto dan Afrizal, *Op.Cit* h.34-35

daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban serta peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.²⁸

Berdasarkan penjelasan diatas, pemekaran daerah merupakan Pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1 (satu) daerah provinsi menjadi satu daerah baru sesuai dengan ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pemekaran wilayah, yang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat melalui efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban serta peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Menurut Arif Rosman Effebdy²⁹, terdapat beberapa alasan mengapa pemekaran daerah menjadi pendekatan yang diminati dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu: *Pertama*, keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas/terukur. Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan

²⁸ Lukman Santoso, Implikasi Pemekaran Daerah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Pasca Reformasi, *Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Volume 7, No 1, April 2017, h. 265-266

²⁹ Lukman Santoso, Problematika Daerah Pasca Reformasi di Indonesia, *Sepermasi Hukum*, Vol. 1, No. 2, Desember 2012, h.275

melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas. *Kedua*, mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru. *Ketiga*, penyerapan tenaga kerja secara luas di sektor pemerintahan dan bagi-bagi kekuasaan dibidang politik dan pemerintahan. Kenyataan politik seperti ini karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak ikutan pemekaran daerah.

Gie menyebutkan lima faktor yang harus diperhatikan dalam pembentukan/pemekaran suatu wilayah yaitu:

- a. Luas daerah suatu wilayah sedapat mungkin merupakan suatu kesatuan dalam perhubungan, pengairan dan dari segi perekonomian dan juga harus diperhatikan keinginan penduduk setempat, persamaan adat istiadat serta kebiasaan hidupnya.
- b. Pembagian kekuasaan pemerintahan dalam pembentukan/pemekaran hendaknya diusahakan agar tidak ada tugas dan pertanggungjawaban kembar dan harus ada keseimbangan antara beratnya kewajiban yang diserahkan dengan struktur di daerah.
- c. Jumlah penduduk tidak boleh terlampau kecil.
- d. Pegawai daerah sebaiknya mempunyai tenaga-tenaga profesional dan ahli.

- e. Keuangan daerah yang berarti terdapat sumber-sumber kemakmuran yang dimiliki oleh daerah itu sendiri.

2. Dasar Hukum Pemekaran Wilayah

UUD 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan dalam Pasal 18B ayat (1) bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.³⁰

Selanjutnya pada ayat (2) pasal yang sama tercantum kalimat sebagai berikut.

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Secara lebih khusus, UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur ketentuan mengenai pembentukan daerah dalam Bab II tentang Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus. Dapat dianalogikan, masalah pemekaran wilayah juga termasuk dalam ruang lingkup pembentukan daerah. UU Nomor 32 Tahun 2004 menentukan bahwa pembentukan suatu daerah harus ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (1). Kemudian, ayat (2) pasal yang sama menyebutkan sebagai berikut.

³⁰ Indonesia (a), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, ps. 18B

“Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dokumen, serta perangkat daerah.”³¹

Legalisasi pemekaran wilayah dicantumkan dalam pasal yang sama pada ayat berikutnya (ayat (3)) yang menyatakan bahwa, “Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih”. Dan ayat (4) menyebutkan, “Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan.”³²

3. Syarat-syarat Untuk Melakukan Pemekaran

a. Syarat Dasar Kewilayahan

Persyaratan dasar kewilayahan dalam pasal 34 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa meliputi syarat:

1) Luas Wilayah Minimum

Ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan yang di atur di dalam peraturan pemerintahan.

³¹ Indonesia (b), *Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah*, No. 32 Tahun 2004, LN No. 125 tahun 2004, TLN No. 4437, ps. 4

³² *Ibid*

2) Jumlah Penduduk

Ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan yang di atur di dalam peraturan pemerintahan

3) Batas Wilayah

Yang di buktikan dengan titik koordinat pada peta dasar

4) Cakupan Wilayah

Cakupan wilayah meliputi paling sedikit 5 (lima) daerah kabupaten/kota untuk pembentukan daerah provinsi, paling sedikit lima kecamatan untuk pembentukan daerah kabupaten dan paling sedikit empat kecamatan untuk pembentukan daerah kota.

5) Batas Usia Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

Dalam pasal 33 ayat (6) ditegaskan bahwa batas usia minimal meliputi batas usia minimal daerah provinsi yaitu 10 tahun dan daerah kabupaten/kota 7 tahun terhitung sejak pembentukan dan batas usia minimal kecamatan yang menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten/kota 5 tahun terhitung sejak pembentukan.

b. Persyaratan Dasar Kapasitas Daerah

Pasal 34 ayat (3) ditegaskan bahwa persyaratan dasar kapasitas daerah sebagaimana di maksud pada pasal 34 ayat (91) huruf b adalah kemampuan daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun

2014 dinyatakan bahwa persyaratan dasar kapasitas daerah didasarkan pada parameter berikut ini yaitu:

1) Geografi dengan parameter:

- a. Lokasi Ibu Kota
- b. Hidrografi
- c. Kerawanan Bencana

2) Demografi dengan parameter:

- a. Kualitas Sumber Daya Manusia
- b. Distribusi Penduduk

3) Keamanan dengan parameter:

- a. Tindakan Kriminal Umum
- b. Konflik Sosial

4) Sosial Politik, Adat dan Tradisi dengan parameter:

- a. Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum
- b. Kohesivitas Sosial
- c. Organisasi Kemasyarakatan

5) Potensi Ekonomi dengan parameter:

- a. Pertumbuhan Ekonomi
- b. Potensi Unggulan Daerah

6) Keuangan Daerah, dengan parameter:

- a. Kapasitas Pendapatan Asli Daerah Induk
- b. Potensi Pendapatan Asli Calon Daerah Persiapan
- c. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



7) Kemampuan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan parameter:

- a. Aksetabilitas Pelayanan Dasar Pendidikan
- b. Aksetabilitas Pelayanan Dasar Kesehatan
- c. Aksetabilitas Pelayanan Dasar Infrastruktur
- d. Jumlah Pegawai Sipil Negara Di Daerah Induk
- e. Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Persiapan

Secara keseluruhan ada beberapa syarat dalam pelaksanaan pemekaran daerah harus dipenuhi, yaitu:

a. Syarat Administratif

Merupakan syarat yang berkenaan dengan persetujuan dalam pemekaran daerah. Adapun syaratnya adalah:

1) Bagi Provinsi

Meliputi adanya persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk, dan Gubernur, serta rekomendasi menteri dalam negeri.

2) Bagi Kabupaten/Kota

Meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur serta rekomendasi menteri dalam negeri

b. Syarat Teknis

Merupakan syarat yang meliputi faktor yang akan menjadi dasar pembentukan daerah atau pemekaran wilayah yang mencakup

kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, keendudukan, luas daerah pertahanan, dan keamanan. Hal ini berarti pemekaran daerah tidak dapat dilaksanakan tanpa dasar hukum yang jelas, karena harus mempertimbangkan keadaan kemampuan ekonomi daerah tersebut, apakah sumber daya alam daerah dapat menopang pemasukan pendapatan perekonomian daerah, serta apakah daerah memiliki potensi dalam mewujudkan tujuan dari pemekaran daerah itu sendiri.

c. Syarat Fisik

Maliputi persyaratan mengenai jumlah desa atau tambahan kabupaten kecamatan yang terdapat di dalam suatu wilayah atau daerah tertentu yang akan melakukan pemekaran daerah. Adapun syarat fisik yaitu untuk pembentukan atau pemekaran provinsi maka syaratnya yaitu harus terdiri dari minimal lima Kabupaten/Kota, sedangkan untuk provinsi minimal terdiri atas lima kecamatan, dan untuk pemekaran atau pembentukan kota minimal terdiri dari empat memuat kecamatan.

Secara rinci, terdapat beberapa alasan yang mendasar dilakukannya pemekaran daerah atau wilayah, yaitu:

1) Alasan Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

Hal ini dijadikan alasan utama karena adanya kendala geografis, infrastruktur dan sarana perhubungan yang minim, seperti terjadi

pada pemekaran Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Irian Jaya Barat.

2) Alasan Historis

Pemekaran suatu daerah dilakukan karena alasan sejarah yaitu bahwa daerah hasil pemekaran memiliki nilai historis tertentu.

3) Alasan Kultural Atau Budaya

Dimana pemekaran daerah terjadi karena menganggap adanya perbedaan budaya antara daerah yang bersangkutan dengan daerah induknya.

4) Alasan Ekonomi

Dimana pemekaran daerah dilakukan agar dapat mempercepat pembangunan di daerah.

5) Alasan Anggaran

Pemekaran daerah dilakukan untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah.

6) Alasan Keadilan

Bahwa pemekaran dijadikan alasan untuk mendapatkan keadilan yang artinya pemekaran daerah diharapkan akan menciptakan keadilan dalam hal pengisian jabatan publik dan pemerataan pembangunan.

Sebagaimana dilihat dari beberapa alasan tersebut, maka Indonesia adalah tepat jika dilakukan pemekaran daerah, karena di Indonesia adalah negara yang secara geografis cukup luas dan memungkinkan

dilakukannya pemekaran daerah. Meskipun demikian pemekaran daerah yang dilakukan bukan sebagai cara untuk melakukan pemecahan bangsa, akan tetapi semua bertujuan untuk persatuan.³³ Pemekaran daerah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rantang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan mempercepat pembangunan di daerah.

4. Pemekaran Wilayah

Pemekaran adalah sesuatu bagian yang utuh atau suatu kesatuan yang di bagi atau dipisah menjadi beberapa bagian yang berdiri sendiri. Jadi dengan demikian daerah/wilayah pemekaran adalah suatu daerah/wilayah yang sebelumnya satu kesatuan yang utuh yang kemudian dibagi atau demekarkan menjadi beberapa bagian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.³⁴

Dalam konteks pemekaran daerah atau wilayah tersebut yang lebih dikenal dengan pembentukan daerah otonomi baru, bahwa daerah otonomi tersebut diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang besar dalam mengurus dirinya sendiri, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah, sumber daya alam dan pengelolaan bantuan pemerintah pusat kepada daerah otonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat setempat yang lebih baik.

³³ Meilia Lovita, *Op.Cit* h.11-18

³⁴ W.J.S poerwardarminta, *Op.Cit* h.478

Dinamika perkembangan wilayah menjadi otonomi seperti itu disikapi pemerintah pusat dengan diberlakukannya otonomi daerah sejak Januari 2001. Dalam hubungannya dengan pembentukan wilayah atau daerah otonomi, seperti dalam pasal 18 UUD 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah kabupaten dan daerah kota untuk mendukung otonomi daerah, pemerintah telah mempersiapkan UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian dipertegas dalam peraturan pemerintahan nomor 129 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah, walaupun undang-undang tersebut telah direvisi menjadi UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dalam bab II pasal 4-8 menyatakan tentang pembentukan daerah dan kawasan khusus. Persoalan sekarang adalah dengan mempertanyakan urgensi pembentukan pemekaran wilayah, dan pada saat bersamaan dengan pertimbangan bahwa penting atau tidak pentingnya pemekaran wilayah atau daerah adalah dengan melihat kembali bahwa ternyata pemekaran itu sendiri merupakan peluang yang oleh masyarakat daerah merupakan “hasil diambil” karena didukung oleh undang-undang. Pada saat itu juga mendapat dukungan secara politik yakni dengan adanya pergerakan etnisitas masyarakat lokal.³⁵

³⁵ J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007),

5. Pemekaran Wilayah Menurut Perpektif Ekonomi Islam

Islam memandang pentingnya tolong-menolong sesama manusia, hal ini sesuai dengan firman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya; “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah : 2)³⁶

Dan juga Firman Allah swt :

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَم أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٥٩﴾

Artinya : “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.(QS. 5. Al-Maaidah:49)³⁷

Ayat diatas menyerukan kepada pemimpin agar memutuskan suatu keputusan hendaklah berdasarkan petunjuk Allah, karena dengan

dikutip oleh Eko Oktah Supri Lariky, *Op.Cit* h.169

³⁶ Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Jumanatul Ali Al-Qur'an dan Terjemahnya, CV Penerbit J-ART : Bandung, h. 106

³⁷ *Ibid*, h. 116

demikian masyarakat akan merasakan arti dari sebuah naungan dalam satu kepemimpinan dalam islam. Begitu juga halnya dengan perekonomian masyarakat, telah menjadi tugas pemerintah untuk memerhatikan bagaimana kesejahteraan masyarakat dibidang ekonomi. Pemekaran wilayah pada prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan dan mempercepat pelayanan, kehidupan demokrasi dan hubungan yang serasi antar daerah dan pusat.

Pada hakekatnya pemekaran wilayah sebagai upaya peningkatan sumber daya berkelanjutan, meningkatkan keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sektor. Memperkuat integrasi nasional yang secara keseluruhan dapat meningkatkan kualitas hidup.³⁸ Oleh karena itu pemekaran wilayah adalah cara dari pemerintah untuk mempersempit ruang lingkup guna untuk memudahkan pemerintah memantau kondisi perekonomian masyarakat, sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat.

C. Konsep Pendapatan perkapita

1. Pengertian Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu yang biasanya satu tahun. Pendapatan perkapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada periode

³⁸ Saeful Anwar, *Op.Cit*, h.25

tertentu. Pendapatan perkapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut.³⁹

Kuncoro berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata produk suatu Negara pada waktu tertentu. Nilainya diperoleh dan membagi pendapatan nasional bruto pada satu tahun tertentu dengan jumlah produk pada tahun tersebut. Sehingga taraf hidup masyarakat atau individu ditinjau dari sudut pandang ekonomi yang ditentukan oleh tingkat pendapatan yang diperoleh dari suatu kegiatan tertentu.⁴⁰

Sadono Sukirno menyatakan bahwa pendapatan nasional adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan sesuatu negara dalam suatu tahun tertentu. Pendapatan nasional pada harga berlaku adalah pendapatan negara yang dihitung menurut harga-harga pada tahun yang produksi nasionalnya dihitung.⁴¹ Sedangkan pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan perkapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan per

³⁹ Murnlati, Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pendapatan Perkapita Kabupaten Kerinci, *J-MAS* Vol.2 No.1, April 2017, h.126-128

⁴⁰ Hasriani, *Studi Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tafagapi Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali*, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari, 2016) h. 23

⁴¹ Mohammad Sofyan, *Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita, Tingkat Suku Bunga, Jumlah Uang Beredar (M2) dan Inflasi Terhadap Jumlah Tabungan di Indonesia*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011) h. 68-69

kapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut.⁴²

Purbayu Budi Santoso dan Muliawan Hamdani menyatakan bahwa ukuran kesejahteraan penduduk suatu negara biasanya juga didasarkan atas besarnya jumlah pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita merupakan bentuk rata-rata yang diperoleh dari pembagian jumlah produk nasional bruto oleh jumlah keseluruhan penduduk. Semakin besar nilai pendapatan perkapita, diasumsikan bahwa anggota masyarakat suatu negara makin sejahtera dan pembangunan perekonomian dinilai makin berhasil.⁴³

Sadono Sukirno menyatakan bahwa salah satu komponen dari pendapatan nasional yang selalu dilakukan perhitungannya adalah pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk sesuatu negara pada suatu masa tertentu. Nilainya diperoleh dengan membagi nilai Produk Domestik Bruto atau Produk Nasional Bruto suatu tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. Dengan demikian pendapatan perkapita dapat dihitung menggunakan salah satu formula berikut:⁴⁴

$$a) \text{ PDB Perkapita} = \frac{\text{PDB}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

⁴² *Ibid*, h. 68-69

⁴³ *Ibid*, h.70

⁴⁴ *Ibid*

$$b) \text{ PNB Perkapita} = \frac{\text{PNB}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Berdasarkan penjelasan diatas, pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata produk suatu Negara pada waktu tertentu, nilainya diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut. Manfaat yang diperoleh dari menghitung pendapatan perkapita adalah 1) dapat mengetahui tingkat perekonomian suatu negara, jika pendapatan per kapita tinggi berarti perekonomian sudah maju, demikian pula sebaliknya, 2) dapat melihat perkembangan perekonomian dan kemakmuran suatu negara, dengan cara membandingkan besarnya pendapatan per kapita dari tahun ketahun, 3) dapat membandingkan tingkat kemakmuran (standar hidup) antar-negara, apakah tergolong kelompok rendah, menengah atau tinggi.

Pendapatan perkapita yang merupakan salah satu prestasi ekonomi sangat erat kaitannya dengan penambahan penduduk. Sehingga apabila penambahan pendapatan nasional lebih besar dari pada penambahan penduduk maka tingkat pendapatan per kapita penduduk meningkat. Sebaliknya apabila penambahan pendapatan nasional lebih kecil dari pada penambahan penduduk maka tingkat pendapatan per kapita menurun. Untuk mempertahankan tingkat per kapita relatif perlu dicapai tingkat pertumbuhan nasional yang sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Pendapatan nasional dan pendapatan per kapita itu sendiri akan naik apabila produktivitas perkapita mengalami kenaikan. Untuk menaikkan produktivitas per kapita berarti harus ada perubahan-perubahan dalam perekonomian misalnya perubahan struktur ekonomi, teknik produksi, struktur produksi dan masyarakat statis berkembang menjadi masyarakat dinamis.⁴⁵ Dengan demikian, hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mempercepat proses pertumbuhan ekonomi.

2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Rendahnya Pendapatan Perkapita

Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pendapatan perkapita pada Negara yang sedang berkembang:⁴⁶

- a. Tingkat pendidikan rendah sehingga pengetahuannya sedikit
- b. Keterampilan dan Kecakapan yang rendah, sehingga kekurangan tenaga ahli
- c. Modal yang dimiliki terlalu sedikit
- d. Kekurangan akan sumber daya alam
- e. Kemalasan dan ketidak disiplin seseorang
- f. Sikap yang tidak mau berproduksi
- g. Pendapatan nasional yang rendah

3. Upaya Meningkatkan Pendapatan Per Kapita

- a. Laju pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan agar pendapatan meningkat

⁴⁵ Murnlati, *Op.Cit.*, h.127

⁴⁶ *Ibid*

b. Laju pertumbuhan penduduk perlu untuk dikendalikan. Pemerintah menyadari keterbatasan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan nasional perlu diimbangi dengan usaha manekan kenaikan jumlah penduduk. Dengan menekan laju pertumbuhan penduduk, diharapkan kenaikan jumlah penduduk tidak melebihi kenaikan pendapatan nasional. Dengan demikian, setiap kenaikan pendapatan nasional akan dapat memperbaiki tingkat pendapatan per kapita. Jadi jelas bahwa usaha meningkatkan pendapatan nasional tidak berdiri sendiri. Agar dapat memberikan perbaikan dalam hal pendapatan per kapita, usaha meningkatkan pendapatan nasional harus diimbangi dengan pengendalian jumlah penduduk. Apabila tidak, usaha meningkatkan pendapatan nasional untuk memperbaiki pendapatan per kapita akan sia-sia.

c. Meningkatkan sumber daya manusia juga bukan hal mudah. Dana yang diperlukan untuk itu sangat besar, misalnya untuk pendidikan, latihan, dan peningkatan kesehatan. Besarnya dana yang terserap itu berarti mengurangi kemampuan Negara untuk menyediakan modal yang dapat menambah produksi.

Secara matematis, rumus perhitungan Pendapatan per kapita adalah =

$$\frac{\text{Pendapatan Nasional Bruto (GNP)}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Pendapatan per kapita (per capita income) adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu

tahun. Pendapatan per kapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan per kapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut.⁴⁷

4. Hubungan Dampak Pemekaran Wilayah Dengan Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu yang biasanya satu tahun. Pertumbuhan pendapatan perkapita yang positif dari tahun ketahun menjadi indikator laju pertumbuhan ekonomi, dimana peningkatan pendapatan akan meningkatkan taraf kesejahteraan dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut masyarakat akan membelanjakan pendapatan yang diterima di sektor-sektor ekonomi yang berdampak pada berputarnya roda perekonomian di daerah. Peningkatan aktivitas perekonomian akan memberikan sumbangan kepada pendapatan daerah dalam bentuk setoran pajak (antara lain: pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan umum, pajak bumi dan bangunan, pajak reklame, bea balik nama) dan retribusi (antara lain: retribusi ijin usaha/HO, retribusi kios/los pasar, retribusi parkir, retribusi sampah, retribusi IMB, retribusi APAR) yang akan digunakan daerah untuk membiayai pembangunan

⁴⁷ *Ibid* h. 126-128

sarana prasarana umum dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Kemampuan daerah untuk melakukan pendanaan atas kebutuhan daerah itu sendiri menunjukkan kemandirian daerah yang menjadi indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan otonomi daerah.⁴⁸ Dapat dikatakan bahwa peningkatan perekonomian merupakan hal yang utama yang memicu tingginya PDRB Perkapita.

5. Pendapatan Perkapita Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu yang biasanya satu tahun.⁴⁹ Semakin besar nilai pendapatan perkapita, diasumsikan bahwa anggota masyarakat suatu negara makin sejahtera dan pembangunan perekonomian dinilai makin berhasil.

Islam menentukan fungsi pokok negara dan pemerintahan dalam bidang ekonomi, yaitu menghapuskan kesulitan ekonomi yang dialami rakyat, memberi kemudahan pada akses pengembangan ekonomi kepada seluruh lapisan rakyat dan menciptakan kemakmuran.⁵⁰ Al-Qur'an memaklumkan tujuan negara dalam bidang ekonomi ini:

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ۖ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ ﴿١١٩﴾

Artinya: Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa

⁴⁸ Ari Yuniarti, *Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Perkapita, Tingkat Investasi dan Tingkat Industrialisasi Terhadap Kemandirian Daerah*, (Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta 2008), h. xxxvi-xxxviii

⁴⁹ Murnlati, *Op.Cit.*, h.126-128

⁵⁰ Eko Oktah Supri Lariky, *Op.Cit.*, h. 55-56

dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya".
(Thaha : 118-119)⁵¹

Dalam kaitan ini, Imam Al-Ghazali menguraikan tanggungjawab sosial ekonomi negara :

*"Tanggungjawab pengusaha adalah membantu rakyat ketika mereka menghadapi kelangkaan pangan, kelaparan dan penderitaan, khususnya ketika terjadi kekeringan atau ketika harga tinggi sampai rakyat mendapatkan penghasilan kembali, karena dalam keadaan tersebut sulit bagi mereka memenuhi dua tujuan tersebut. Dalam kondisi tersebut negara harus memberi makanan kepada rakyat dan memberikan bantuan keuangan kepada mereka dari kekayaan negara supaya mereka dapat meningkatkan pendapatannya mereka".*⁵²

Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa, pengusaha apabila melihat rakyat kelaparan maka negara harus memberi pertolongan berupa bantuan makan kepada rakyat dan memberikan bantuan keuangan agar mereka dapat meningkatkan kebutuhan mereka baik untuk keperluan sehari-hari atau modal untuk membuka usaha. Negara harus meningkatkan distribusi pendapatan secara merata, sehingga tercapainya masyarakat yang sejahtera.

⁵¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, h. 320

⁵² Imam Al-Ghazali, (On-Line) tersedia di <http://elfryan.blogspot.com/kedudukan-pemerintah-dalampembangunan.html>, diakses pada 30 mei 2018 pukul 15:18

D. Konsep Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan klasik yang telah ada sejak umat manusia ada. Sampai saat ini belum ditemukan suatu rumusan maupun formula penanganan kemiskinan yang dianggap jitu dan sempurna sehingga harus terus menerus dikembangkan. Ada banyak definisi kemiskinan dan konsep tentang kemiskinan World Bank membagi dimensi kemiskinan kedalam empat hal pokok, yaitu *lack of opportunity*, *low capabilities*, *low level security*, dan *low capacity*. Kemiskinan dikaitkan juga dengan keterbatasan hak-hak sosial, ekonomi, dan politik sehingga menyebabkan kerentanan, keterpurukan, dan ketidakberdayaan.⁵³

Kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non makanan. Dari sisi makanan, BPS menggunakan indikator yang direkomendasikan oleh Widyakarya Pangan dan Gizi yaitu kebutuhan gizi 2.100 kalori per orang per hari, sedangkan dari sisi kebutuhan non makanan tidak hanya terbatas pada sandang dan papan melainkan termasuk pendidikan dan kesehatan. Model ini pada intinya membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan suatu garis kemiskinan (GK), yaitu jumlah rupiah untuk

⁵³ Mohd Kurniawan DP, Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Di Kabupaten Musi Banyuasin (Studi Kasus Di Kecamatan Sungai Lilin), *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* Volume 8 No. 01 Juli 2017, h. 16-17

konsumsi per orang per bulan.⁵⁴ Kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasar minimum.⁵⁵

Dimensi kemiskinan menurut Effendi, kemiskinan ini dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumber daya alam yang tersedia pada kelompok itu dan membandingkannya dengan ukuran-ukuran baku. Menurut pengertian ini kemiskinan sekelompok orang dikaitkan dengan pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya mengacu pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum untuk hidup layak.⁵⁶

Menurut Mudrajat, Kuncoro menerangkan bahwa penyebab kemiskinan adalah berasal dari teori Nurkse yaitu teori lingkaran kemiskinan (*Vicious circle of poverty*) dimana terdapat tiga penyebab utama yaitu: (i) Adanya keterbelakangan, dan ketertinggalan Sumber Daya Manusia (SDM), yang tercermin dari rendahnya Indeks Pembangunan Manusia, (ii) ketidaksempurnaan pasar, dan (iii) kurangnya modal yang menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas menyebabkan rendahnya pendapatan yang mereka terima (tercermin oleh rendahnya PDRB per kapita). Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi.

⁵⁴ Kemiskinan, (On-line) tersedia di <https://www.bps.go.id>. Diunduh 4 April 2018

⁵⁵ Hendra Esmara, *Perencanaan dan Pembangunan Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1986), h.287

⁵⁶ Cica Sartika, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan", *Jurnal dan Makalah*, (Vol 1 April 2016), h.23

Rendahnya investasi berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah (tercermin oleh tingginya angka pengangguran). Rendahnya akumulasi modal disebabkan oleh keterbelakangannya, begitu seterusnya.⁵⁷

Pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar, berpenghasilan cukup, bahkan tidak berpenghasilan sama sekali, sehingga mengalami kesengsaraan dalam mencapai kesejahteraan. Kesejahteraan merupakan tujuan akhir bagi setiap Manusia di muka bumi ini. Kesejahteraan diartikan sebagai *Falah* yaitu kebahagiaan yang hakiki di dunia maupun akhirat.⁵⁸

2. Indikator Kemiskinan

Foster dkk (1984) memperkenalkan tiga indikator untuk mengukur kemiskinan⁵⁹ yaitu:

- a. *The incidence of poverty* yaitu presentase dari populasi yang hidup didalam keluarga dengan pengeluaran konsumsi per kapita dibawah garis kemiskinan
- b. *The depth of poverty* yang menggambarkan dalamnya kemiskinan disuatu wilayah yang diukur dengan Indeks Jarak Kemiskinan (IJK), atau dikenal dengan sebutan *Poverty Gap Index*. Indeks ini

⁵⁷ Prima Sukmaraga, *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per kapita, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi Universitas Diponegoro Semarang dipublikasikan tahun 2011

⁵⁸ P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), h.2

⁵⁹ Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h.96-97

mengestimasi jarak/perbedaan rata-rata pendapatan orang miskin dan garis kemiskinan sebagai suatu proporsi dari garis tersebut

- c. *The severity of poverty* yang diukur dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (IKK). Indeks ini pada prinsipnya sama dengan IJK. Namun, selain mengukur jarak yang memisahkan orang miskin dari garis kemiskinan atau penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks ini juga disebut dengan *distributionally sensitive index* dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan.⁶⁰

3. Macam-macam Kemiskinan

a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut diidentifikasi banyaknya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan tertentu, dimana diperhitungkan berdasarkan standar hidup minimum suatu negara, standar minimal antar negara berbeda dengan negara lain.⁶¹

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Dengan kata lain, kemiskinan relatif berkaitan dengan permasalahan distribusi pendapatan.⁶² Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan jika tingkat hidup masyarakat berubah.⁶³

⁶⁰ *Ibid*, h.97

⁶¹ Nur Rianto al Arif, *Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori Dan Analisis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h.227

⁶² *Ibid*

⁶³ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), h.302

c. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah ketidakberdayaan sekelompok masyarakat dibawah suatu sistem pemerintahan yang menyebabkan mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksploitasi.⁶⁴

4. Penyebab Kemiskinan

Terdapat tiga macam pendekatan yang menjelaskan mengenai sebab-sebab kemiskinan, yaitu:

a. *System approach*

System approach adalah pendekatan yang lebih menekankan pada adanya keterbatasan pada aspek-aspek geografi, ekologi, teknologi, dan demografi.⁶⁵ Kondisi kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor tersebut dianggap lebih banyak menekan warga masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan atau pedalaman.

b. *Decision-making model*

Pendekatan ini menekankan pada kurangnya pengetahuan, keterampilan, dan keahlian sebagian warga masyarakat dalam merespon sumber-sumber daya ekonomi, baik yang bersal dari dalam maupun yang berasal dari luar.⁶⁶ Dengan kata lain kemiskinan ini disebabkan karena kurangnya inivasi masyarakat untuk melaksanakan wirausaha, sehingga masyarakat hanya mengandalkan lapangan pekerjaan yang tersedia oleh orang lain dan pemerintah tanpa ada upaya untuk menciptakan lapangan kerja sendiri.

⁶⁴ Nur Rianto al Arif, *Op Cit.*, h.228

⁶⁵ *Ibid*, h.234

⁶⁶ Nur Rianto, *Loc.Cit.*, h.228

c. *Structural approach*

Pendekatan ini melihat bahwa kemiskinan ini terjadi karena ada ketimpangan dalam kepemilikan atas faktor produksi, seperti tanah, teknologi, produktivitas dan bentuk modal lainnya.⁶⁷ Hal ini tercermin dengan adanya sekelompok kecil dari masyarakat yang justru menguasai modal dan perekonomian masyarakat secara lebih dominan, seperti para pengusaha raksasa, dan sebagainya.

5. Hubungan Dampak Pemekaran Wilayah Dengan Kemiskinan

Kemiskinan yang terjadi di negara-negara berkembang disebabkan karena kebutuhan manusia yang bermacam-macam, adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang, hal ini terlihat bahwa mayoritas penduduk miskin hanya memiliki sumber daya alam dalam jumlah yang terbatas.

Para pembuat kebijakan pembangunan selalu berupaya agar alokasi sumber daya dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat. Namun, karena ciri dan kondisi masyarakat yang sangat beragam dan ditambah pula dengan tingkat kemajuan ekonomi negara yang bersangkutan yang terkadang masih lemah, maka kebijakan nasional umumnya diarahkan untuk memecahkan permasalahan jangka pendek. Sehingga, kebijakan pemerintah belum berhasil memecahkan permasalahan kelompok ekonomi ditingkat bawah. Selain itu, kebijakan

⁶⁷*Ibid*

dalam negeri seringkali tidak lepas dengan kondisi diluar negeri yang secara tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, antara lain dari segi pendanaan pembangunan.⁶⁸

Pemerintah melakukan pemekaran wilayah guna untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan, sehingga untuk daerah-daerah yang sulit terjangkau dapat mengejar ketertinggalan dari daerah yang lain. Cara yang digunakan seperti membangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain.

6. Kemiskinan Kabupaten Daerah Otonomi Baru di Provinsi Lampung

Kabupaten Pringsewu memiliki potensi baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dilihat dari sentra hasil pertanian berupa hasil hortikultura, pangan, peternakan, perdagangan, dan pertambangan. Tetapi pada kenyataannya menurut data yang diperoleh dari BPS Provinsi Lampung Kondisi kemiskinan Kabupaten Pringsewu setelah dilakukannya pemekaran tiap tahunnya meningkat, tingkat tertinggi adalah tahun 2016 yaitu 45.72 ribu jiwa.

Hal ini disebabkan sempitnya lapangan kerja serta masyarakat tidak mampu meraih peluang ekonomi, masyarakat tidak memiliki SDM yang memadai dan Kebijakan pemerintah yang kurang mendukung terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Untuk penanggulangan kemiskinan, maka dilakukan Kampung Tematik dengan cara pelatihan juga bagi

⁶⁸ Lincolin Arsyat, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2015), h.300

mereka yang belum punya ketrampilan dan selanjutnya ada pendampingan, agar bisa berkembang lebih baik.⁶⁹

Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki potensi dari sektor pertanian dan perkebunan. Rusaknya infrastruktur menghambat peningkatan kualitas pelayanan masyarakat sehingga akses menjadi terhambat. Untuk saat ini Kabupaten Tulang Bawang Barat masih mengembangkan pembangunan infrastruktur diantaranya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan keberdayaan kualitas pelayanan dan mengembangkan perekonomian daerah untuk memperluas kesempatan kerja.

Masyarakat di Kabupaten Mesuji bukan tanpa masalah. Dengan komposisi penduduk yang beragam, potensi ekonomi yang kaya, sumber daya alam yang luas, tapi persoalan yang muncul kian banyak. Masalah kemiskinan adalah persoalan yang tidak terelakkan. Sebagaimana yang diungkap wakil Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Lampung (Lampung Post, 02/03/06), bahwa dari jumlah 1,5 juta masyarakat miskin yang tergolong dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) paling banyak berasal dari kabupaten Kabupaten Mesuji, Lampung Barat dan Tanggamus. Dibawah ini beragam masalah yang ada di Kabupaten Mesuji yaitu:

⁶⁹ Lampung Pagi.Com/ *Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Pringsewu Bukan Wacana htm*, di akses pada 27 Oktober 2018 pukul 20:33

- a) Rusaknya kondisi jalan dan jembatan mengakibatkan bertambahnya daerah terisolasi yang berdampak pada lambannya pertumbuhan ekonomi.
- b) Sengketa tanah dan kepastian hukum kepemilikan tanah serta pemahaman masyarakat terhadap proses kepemilikan tanah. Banyaknya lahan tidur yang disebabkan oleh kurangnya pembinaan terhadap para petani.
- c) Penerangan listrik di pedesaan sangat diharapkan oleh masyarakat pedesaan.
- d) Sulitnya mendapatkan pupuk pada saat musim tanam.
- e) Merosotnya harga hasil bumi pada saat panen raya.
- f) Kurangnya Pembinaan kepada para petani oleh petugas penyuluh pertanian (PPL).
- g) Kurangnya air bersih di pedesaan yang hingga saat ini selalu dirasakan masyarakat terutama pada saat musim kemarau dan didaerah rawa.
- h) Pembangunan yang tersentralisasi tidak merata pada semua daerah yang ada di Kabupaten induk Tulang Bawang sehingga makin termarginalnya Kabupaten Mesuji yang jauh dari ibukota kabupaten induk.
- i) Kondisi bangunan gedung sekolah banyak yang rusak sehingga tidak layak untuk digunakan.

- j) Kurangnya perhatian dengan tempat pendidikan agama/ pondok pesantren.

Persoalan yang tumbuh dari hari ke hari pun terus meningkat dan ikut serta menggerogoti Kabupaten Mesuji ini. Yang jadi korban masyarakatnya. Secara umum, sampai kini, ada beberapa kesulitan yang terus dihadapi oleh masyarakat di Kabupaten Mesuji selama beberapa tahun terakhir diantaranya masalah ekonomi masyarakat yang rendah, pertanian tidak terkelola dengan baik, infrastruktur yang tidak memadai, pendidikan yang termarginalkan, hingga masalah kurangnya air bersih.

Adapun penyebab dari beragam persoalan tersebut adalah :

1) Ekonomi

- (a). Masih banyak masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan kurangnya sumber penghasilan, kurangnya sosialisasi informasi.
- (b). Banyaknya pengangguran, kurangnya lapangan kerja, kurangnya sosialisasi informasi
- (c). Kesulitan membiayai sekolah, kurangnya informasi

2) Pertanian

- (a). Harga hasil bumi anjlok Jalan rusak, kurangnya perhatian pemda
- (b). Lahan tidur, kurangnya pembinaan dari PPL
- (c). Tanaman padi dan palawija mulai berkurang, kurangnya pembinaan dari PPL

3) Infrastruktur

- (a) Kurangnya perhatian, transportasi terhambat dan mahal karena hampir semua jalan dan jembatan rusak
- (b) Kurangnya perhatian penerangan listrik
- (c) Kurangnya perhatian air bersih di daerah trans rawa-rawa

4) Pendidikan

- (a) Beberapa gedung sekolah di kampung-kampung rata-rata tidak layak pakai, kurangnya perhatian dari sosialisasi dan informasi
- (b) Tempat pendidikan agama/pondok pesantren, kurangnya perhatian
- (c) Olah raga, kurangnya pembinaan potensi olah raga di perkampungan

5) Kesehatan

- (a) Makin berkurangnya persediaan air bersih usaha pemda memberikan bantuan kurang maksimal
- (b) Tenaga dokter sedikit Program pemda mengenai penambahan tenaga kesehatan sampai kampung-kampung kurang maksimal

Pembangunan Kabupaten Mesuji, tidak bisa hanya dengan memfokuskan pembangunan pada proyek fisik semata, namun proyek pemberdayaan manusia juga harus dilakukan secara bersamaan. Pembangunan bersifat fisik semata menyebabkan pembodohan dan tidak terarah. Sebab pembangunan seperti ini, tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dan mengelola produk pembangunan, karena

tidak mengerti secara benar apa yang harus dilakukan. Selain itu masyarakat juga merasa tidak memiliki tanggungjawab dalam pembangunan.

Maka, pembangunan sumber daya manusia (SDM) adalah pekerjaan rumah bagi Pemerintah Daerah. Dengan membangun manusianya, pembangunan fisik dapat terarah dan bertanggungjawab. Beberapa contoh kesalahan pemerintah dalam membuat program pembangunan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah selalu mengesampingkan proyek kemanusiaan tersebut. Padahal, pembangunan fisik harus dapat digunakan seefektif mungkin bagi masyarakat. Namun karena sumber daya manusia masih kurang, pembangunan fisik menjadi tidak efektif dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dalam pembangunan pada Kabupaten Mesuji, harusnya ada keseimbangan antara pembangunan fisik dan SDM. Jika kedua isu dapat dijadikan pijakan pembangunan secara imbang, maka menjadi laju pembangunan akan terkendali dan terarah.

Akibat tidak seimbangnja pijakan dua isu pembangunan itu, faktor-faktor kesejahteraan masyarakat juga terkena imbasnya. Pemerintah daerah biasanya terlalu asyik dengan kesibukannya sendiri, tanpa peduli dengan apa yang terjadi dalam masyarakatnya. Fenomena ini kentara sekali di Kabupaten Mesuji. Kesulitan masyarakat terjadi secara kasat mata, kejahatan terus meningkat, pertanian terabaikan, kesehatan adalah sesuatu yang mustahil bagi masyarakat kelas bawah, pendidikan yang

jauh tertinggal ditambah pula persoalan konflik pertanahan setiap saat siap meletus.

Pada bidang pendidikan, sistem pendidikan yang diterapkan tidak mampu menghalangi anak putus sekolah. Atau tidak berdaya untuk menolong anak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Disisi lain, kurangnya informasi menyebabkan banyaknya gedung pendidikan yang tidak layak pakai lagi namun masih digunakan sebagai sarana belajar dan mengajar. Menjadi wajar jika kemudian anak sekolah tidak konsentrasi dalam belajar atau tidak termotivasi untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Apalagi persoalan pendidikan ini terkait dengan kualitas dan kuantitas guru yang menyampaikan pelajaran. Masih jauh dari yang diharapkan.

Pada bidang ekonomi, kemiskinan merupakan persoalan yang telah menjadi biasa. Hampir setiap kampung, tingkat kemiskinan masih tergolong tinggi. Hal ini dibuktikan bahwa hampir setiap kampung dapat ditemui rumah-rumah yang tidak layak huni. Persoalan tersebut masih ditambah lagi tidak tersedianya fasilitas umum (jalan, jembatan dll) yang sesuai, sehingga harga barang-barang kebutuhan pokok melonjak dan sulit terjangkau

Dibidang pertanian dan perkebunan, terdapat kesulitan petani mengenai ambruknya harga hasil pertanian dan perkebunan. Sedangkan biaya yang dibutuhkan dalam mengelola pertanian tergolong tinggi. Anjloknya harga ini disebabkan belum adanya peraturan dari pemerintah

mengenai standar harga yang sesuai. Di sisi lain, masih banyak lahan tidur yang belum tergarap oleh petani karena tidak paham cara pengelolaannya atau tidak termotivasi untuk mengembangkannya.

Di bidang kesehatan, masyarakat disulitkan dengan tidak tersedianya tenaga kesehatan (dokter) sampai ke kampung-kampung. Akibatnya banyak warga yang sakit hanya berobat pada manteri yang ada di kampung (itu pun jika ada). Hal ini menyebabkan masyarakat yang sakit harus mengeluarkan biaya transportasi untuk berobat ke kota, sedangkan fasilitas jalan masih banyak yang rusak.

Pada bidang olah raga, tidak adanya usaha pemerintah untuk melakukan pembinaan terhadap dunia olah raga yang menyebabkan tidak terkoordinirnya pemuda secara baik.

Pada bidang keamanan, kejahatan masih terus bergentayangan di Kabupaten Mesuji menyebabkan investor atau dunia usaha lain berpikir dua kali untuk berusaha di Kabupaten Mesuji. Kejahatanpun mengakibatkan kegiatan ekonomi masyarakat menjadi terhambat

Sedangkan pada bidang pelayanan, masyarakat sangat disulitkan dengan jauhnya rentang kendali pelayanan pegawai terhadap masyarakat. Selain itu, kualitas pelayanan juga tidak seperti yang diharapkan, birokrasi dipersulit karena kurangnya kontrol dari kepala daerah.

Persoalan yang tak kalah pentingnya adalah tingginya kemungkinan konflik pertanahan yang sangat menyengsarakan warga. Puluhan ribu masyarakat tidak mempunyai tempat tinggal dan selalu dibayang-bayangi

ketakutan akan adanya pengusiran terhadap mereka. Persoalan ini seringkali tidak diselesaikan dengan berpihak pada kepentingan masyarakat banyak, tapi atas kewenangan Pemerintah Kabupaten

Implikasi dari persoalan kasat mata tersebut, masyarakat mengalami kesulitan dari segala penjuru, diterpa berbagai masalah ekonomi dan masalah kemanusiaan serta kemiskinan. Selain karena SDM yang tidak mumpuni, kesulitan masyarakat saat ini pada umumnya bersumber dari kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakatnya sendiri.

Persoalan ini harus segera dicari jalan keluarnya. Segala daya dan upaya layak dilakukan untuk mengatasinya. Sehingga jeritan kemanusiaan, kemiskinan, penggusuran, tingginya tindak kejahatan tidak lagi menjadi bagian dari Kabupaten Mesuji. Sehingga terwujudlah masyarakat yang sejahtera, cerdas, aman, sehat dan bertaqwa yang mampu berpartisipasi dalam pembangunan di Kabupaten Mesuji bersama pemerintah. Dalam hal ini, hubungan pemerintah dan masyarakat sebagai partner yang saling mengisi. Dalam pembangunan, metode bottom up planing adalah sebuah keharusan, sehingga masyarakat dapat secara cerdas terlibat dan merasa bertanggungjawab dalam pembangunan.⁷⁰

7. Kemiskinan Menurut Perpektif ekonomi islam

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks yang sangat tidak dianjurkan oleh islam. Islam melarang kepada umatnya untuk

⁷⁰ Irhandi Juanest Vant, *Daftar Inventarisasi Masalah Kabupaten Mesuji* “(On-Line), tersedia di ikbp-mesuji.blongspot.com”, di unduh pada 24 Oktober 2018 pukul 14:48

meninggalkan keluarganya dalam keadaan lemah dan miskin sesuai dengan firman Allah dalam surat An-nisa sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”(QS. An-Nisa : 9)⁷¹

Kemiskinan merupakan sebuah konsep multidimensi yang sulit untuk didefinisikan secara tunggal. Banyak pakar dalam berbagai disiplin ilmu mendefinisikannya.⁷²

Islam membahas kemiskinan muncul banyak pengertian disebabkan tolak ukur kemiskinan yang digunakan berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Demikian juga dengan Islam. Menurut Al-Ghazali, mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri baik dari kehidupan material dan kebutuhan rohani. Argumen tersebut juga dibuat oleh Ahmed, kemiskinan bukan hanya merupakan perampasan barang dan jasa, tetapi juga kurangnya kemiskinan dalam roh. Islam menganggap kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat. Al-Qur'an memberikan

⁷¹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, h.78

⁷² Irfan Syauqi, *Loc Cit*, h.68

peringatan terhadap manusia yang melalaikan kemiskinan, seperti dalam surah Al-Maa'uun ayat 1-7:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾
وَلَا تَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ
هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَآؤُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ
الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

Artinya: 1. Taukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim, 3. Dan tidak mendorong memberi makan anak yatim, 4. Maka celakalah orang yang shalat, 5. (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap shalatnya, 6. Yang berbuat ria, 7. Dan enggan (memberikan) bantuan.⁷³

Surah Al-Maa'uun ayat 1-7 menunjukkan bahwa kemiskinan itu berbeda sementara manusia itu ada. Banyak orang mengaku beragama dan shalat tetapi tidak ingin menolong orang-orang lemah dan miskin adalah termasuk kedalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Secara implisit pengertian tersebut mengandung makna bahwa kemiskinan dan ketidak miskin akan selalu ada agar manusia saling tolong menolong.⁷⁴

Allah swt juga berfirman dalam surah Al-Muddatstsir ayat 42-47:

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ
نُطْعِمِ الْمَسْكِينِ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَاطِئِينَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نَكْذِبُ

⁷³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, h.602

⁷⁴ Ishomuddin, *Sosiologi Perspektif Islam* (Malang: UMM Pres, 2005), h.353

بِیَوْمِ الدِّینِ ﴿٤٦﴾ حَتَّىٰ أَتْنَا أَلْیَقِینُ ﴿٤٧﴾

Artinya: 42. Apakah yang memasukkan kamu kedalam Saq`ar (neraka)? 43. Mereka menjawab: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, 44. Dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin, 45. Dan adalah kami membicarakan yang bathil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, 46. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan, 47. Hingga datang kepada kami kematian.⁷⁵

Ayat di atas mengemukakan sebab-sebab dicampakkannya segolongan manusia kedalam neraka di hari kemudian kelak. Salah satu dari sebab-sebab itu karena mereka tidak memberi makan kepada orang miskin atau tidak peduli terhadap penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang hidupnya melarat. Hal ini memberi petunjuk bahwa memberi makan kepada orang miskin atau kepedulian terhadap nasib orang yang melarat merupakan salah satu dari perintah agama yang harus ditegakan. Perintah ini memiliki kedudukan yang penting seperti halnya perintah agama kepada manusia agar menegakan shalat atau menyembah Allah.

Rezeki yang berbeda yang diberikan antara manusia yang satu dengan yang lainnya akan menyebabkan kecemburuan sosial jika dilihat dari segi ekonomi, namun pemberian rizki yang berbeda jika dilihat dari sisi demand, islam mempunyai mekanisme distribusi pendapatan, yaitu dengan zakat. Mekanisme ini sanggup meredam kecemburuan solusi dan

⁷⁵ Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, h.576

mencukupi kebutuhan pokok golongan kelas bawah seperti pangan, kesehatan dan pendidikan.⁷⁶

Kemiskinan dapat berkurang dengan cara diterapkannya distribusi zakat, sehingga tidak ada kecemburuan antara kaya dan miskin. Dan perlu adanya pola pikir yang kreatif dan inovatif dalam diri masyarakat agar dapat memperbaiki kehidupan sosial maupun ekonomi.

E. Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai atau pedoman dalam penelitian. Antara lain hasil penemuan dari Bismir dan Afrizal, melakukan penelitian dengan judul “Fenomena Pemekaran Daerah Di Provinsi Kepulauan Riau (Studi Pemekaran Daerah di Kabupaten Bintan)”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan telaah pustaka dan wawancara mendalam terhadap sejumlah responden yang terdiri dari aparaturnya pemerintah, pelaku/elit pemekaran, tokoh masyarakat akademisi dan aktivis NGO.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pemekaran Kabupaten Bintan menjadi Kabupaten Bintan Timur (Bintim) dan Kabupaten Bintan Utara (Binut) rencana awalnya Kabupaten Bintan Utara akan dijadikan sebagai Kabupaten pemekaran, namun dalam perjalanannya scenario ini berubah, karena hasil kajian akademis terlihat bahwa dari aspek PAD 70% Kabupaten Bintan berasal dari daerah yang tergabung dalam Kabupaten Bintan Utara. Sehingga dalam perjalanannya Kabupaten Bintan Utara dijadikan

⁷⁶ Muhamad Nur Rohani, “Kemiskinan Dalam Perspektif Sistem Ekonomi Islam” *Jurnal Dan Makalah*, Vol. 8 No.1 (Mei 2014), h.32

Kabupaten induk dan Kabupaten Bintan Timur sebagai kabupaten pemekaran.⁷⁷

Susanti melakukan penelitian dengan judul “Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan di Kabupaten Lampung Utara”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Nonprobability Sampling dengan teknik *Purposive Sampling*. Metode pengumpulan data menggunakan survey kepada masyarakat dan pakar dengan membagikan lembar kuisioner untuk diisi oleh masyarakat maupun pakar.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan Lampung Utara mengalami peningkatan terlihat dari meningkatnya jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten yang dimekarkannya, sementara angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Utara masih tertinggi walaupun setiap tahunnya mengalami penurunan, demikian pula dengan nilai IPM yang masih lebih rendah dari salah satu daerah yang dimekarkannya yaitu Kabupaten Way Kanan.⁷⁸

Djoko Harmanto melakukan penelitian dengan judul “Pemekaran Daerah Dan Konflik Keruangan Kebijakan Otonomi Daerah Dan Implementasinya Di Indonesia”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semakin banyak daerah pemekaran, semakin banyak potensi konflik keruangan karena jumlah

⁷⁷ Bismir Arianto dan Afrizal, *Op.Cit.*, h.41-41

⁷⁸ Susanti, *Op.Cit.*, h. 257-258

garis batas antar wilayah sebagian sumber konflik jumlahnya semakin banyak. Saat ini jumlah daerah otonomi sudah mendekati angka 500 kabupaten/kota.⁷⁹

Abdul Hakim, melakukan penelitian dengan judul “Analisis Dampak Pemekaran Daerah Ditinjau Dari Aspek Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pemekaran Kabupaten Kepulauan Maranti Dari Kabupaten Bengkalis)”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan uji *Independent Sampel T-Test*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari analisis data secara keseluruhan mengenai rentang kendali (*span of control*) antara DOB dan daerah induk, dampak pemekaran wilayah yang dilakukan dari kinerja ekonomi daerah terbukti belum membaiknya rentang kendali (*span of control*) terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi dan sedangkan dari kinerja pelayanan publik daerah terbukti semakin membaiknya rentang kendali (*span of control*) terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik daerah Kabupaten Meranti pasca kebijakan pemekaran diberlakukan.⁸⁰

Andi Rakasiwi, melakukan penelitian dengan judul “Dampak Pemekaran Terhadap Pembangunan Daerah Di Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

⁷⁹ Djoko Harmanto melakukan penelitian dengan judul “Pemekaran Daerah Dan Konflik Keruangan Kebijakan Otonomi Daerah Dan Implementasinya Di Indonesia” *Jurnal Makara Sains*, Vol. 11 No. 1 (April 2007), h.22

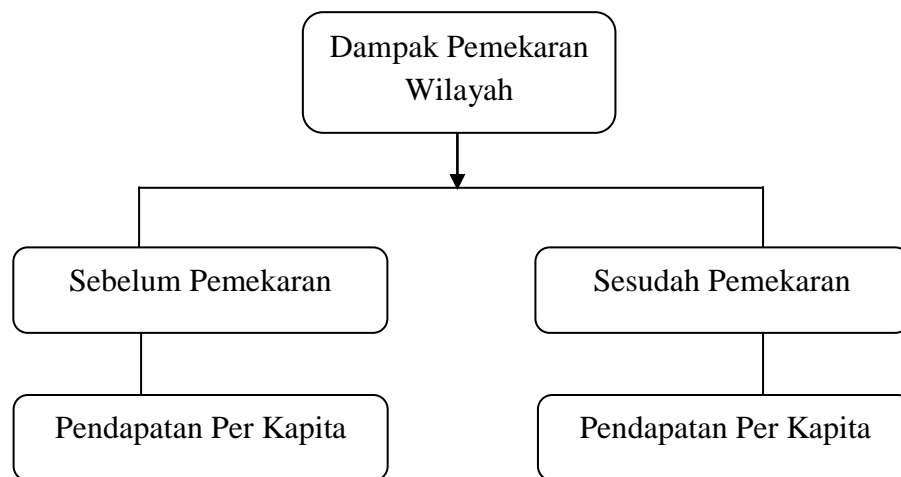
⁸⁰ Abdul Hakim, ”Analisis Dampak Pemekaran Daerah Ditinjau Dari Aspek Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pemekaran Kabupaten Kepulauan Maranti Dari Kabupaten Bengkalis)” *Jurnal JOM Fekon*, Vol. 4 No 1 (Februari 2017), h. 856

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dampak positif pemekaran Kecamatan Pekaitan dalam hal pembangunan telah membawa angin segar terhadap masyarakat, yang mana setelah pemekaran dampak positif yang langsung dirasakan masyarakat Kecamatan Pekaitan adalah kelancaran lalu lintas, merangsang tumbuhnya aktifitas ekonomi, percepatan penyediaan infrastruktur. Sedangkan dampak negatif pemekaran Kecamatan Pekaitan terhadap pembangunan adalah seharusnya dengan adanya pemekaran pembangunan infrastruktur dan kemajuan pembangunan Kecamatan Pekaitan semakin pesat.⁸¹

Berdasarkan kelima penelitian diatas, terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu adalah penelitian sekarang menggunakan studi skala nasional dengan menggunakan data yang di update oleh BPS (Badan Pusat Statistik) di Provinsi Lampung, menggunakan perspektif Ekonomi Islam sedangkan peneliti terdahulu tidak.

⁸¹ Andi Rakasiwi, *Op.Cit.*, h. 7-10

F. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Skema Kerangka Pikir

Pemekaran adalah sesuatu bagian yang utuh atau suatu kesatuan yang di bagi atau dipisah menjadi beberapa bagian yang berdiri sendiri. Jadi dengan demikian daerah/wilayah pemekaran adalah suatu daerah/wilayah yang sebelumnya satu kesatuan yang utuh yang kemudian dibagi atau demekarkan menjadi beberapa bagian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.⁸² Setelah pemekaran Kabupaten Daerah Otonomi Baru di Provinsi Lampung tentu akan menimbulkan dampak dari pemekaran tersebut, adapun dampak yang ditimbulkan adalah pendapatan perkapita. Dari aspek tersebut tentunya diharapkan adanya peningkatan pendapatan perkapita dan menurunkan jumlah penduduk miskin.

⁸² W.J.S poerwardarminta, *Op.Cit* h.478

G. Hipotesis

Pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan per kapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada periode tertentu. Pendapatan per kapita diperoleh dari pendapatan nasional tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut. Sehingga apabila pertambahan penduduk pendapatan nasional lebih besar daripada pertambahan penduduk maka tingkat pendapatan perkapita penduduk yang meningkat. Sebaliknya pertambahan pendapatan nasional lebih kecil dari pertambahan penduduk maka pendapatan perkapita mengalami penurunan.⁸³

Maka dapat dikatakan jika semakin besar nilai pendapatan perkapita, diasumsikan bahwa anggota masyarakat suatu negara makin sejahtera dan pembangunan perekonomian dinilai makin berhasil.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Murniati, bahwa terdapat perbedaan Pendapatan Per Kapita di Kabupaten Kerinci Tahun 2005-2013, empat tahun sebelum pemekaran (2005-2008) dengan empat tahun sesudah pemekaran (2010-2013), ini dibuktikan dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $9,991 > 3,18245$.⁸⁴ Jadi hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1 : Ada perbedaan yang signifikan pendapatan perkapita Kabupaten Daerah Otonomi Baru di Provinsi Lampung sebelum dan sesudah pemekaran wilayah.

⁸³ Murniati, *Op.Cit.*, h.127

⁸⁴ *Ibid*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan secara kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode Penelitian yang dapat diartikan sebagai metode Penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sample tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen Penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.¹ Data kuantitatif terdiri dari PDRB Per Kapita dan Kemiskinan daerah otonomi baru (Kabupaten Pringsewu, Mesuji dan Tulang Bawang Barat) di Provinsi Lampung. Jenis data yang digunakan yaitu *time series* selama kurun waktu delapan tahun 2004-2007 dan tahun 2013-2016.

2. Sifat Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian komparatif karena bertujuan untuk mengetahui nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda.² Penelitian diarahkan untuk mengetahui apakah antara dua kelompok ada perbedaan dalam aspek atau variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen yang bersifat mengukur kemudian data yang diperoleh dianalisis

¹Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D* Cetakan ke-20 (Bandung : Alfabeta, 2014), h.8

² Sugiono, *Statistik Untuk Penelitian*, (Bandung:Alfa) h.88

dengan statistik. Dalam penelitian ini akan membandingkan PDRB Perkapita dan Kemiskinan daerah otonomi baru (Kabupaten Pringsewu, Mesuji dan Tulang Bawang Barat) sebelum dan sesudah pemekaran wilayah di Provinsi Lampung tahun 2004-2007 dan tahun 2013-2016.

B. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang merupakan data-data yang penyajiannya dalam bentuk angka yang secara sepintas lebih mudah untuk di ketahui maupun untuk dibandingkan satu dengan yang lainnya. Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam Penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder.

Data sekunder yaitu sumber yang didapat secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.³ Dengan kata lain, data sekunder didapat dari dokumen-dokumen atau penelitian-penelitian terdahulu yang datanya sudah tersusun.

Data sekunder yang digunakan bersumber dari beberapa publikasi yang diterbitkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik). Pengambilan sumber data dari BPS (Badan Pusat Statistik) karena situs tersebut merupakan situs resmi yang independen, akurat dan obyektif. Jenis data yang digunakan adalah data *time series* periode tahun 2004-2007 dan tahun 2013-2016.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah Dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung pada

³ *Ibid* h.245

subjek penelitian, namun melalui dokumen yang digunakan berupa catatan harian, koran, dan referensi lainnya. Penulis dalam membuat skripsi ini melakukan pengumpulan data dalam dua tahap. Tahap pertama yaitu melalui pengumpulan beberapa data penting seperti jurnal, artikel yang telah dipublikasikan. Tahap kedua yaitu dengan mengumpulkan data-data sekunder yang diperlukan dalam analisis Penelitian. Sumber data yang diperoleh dari data yang dipublikasikan oleh BPS (Badan Pusat Statistik), serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini, dan melalui media cetak. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini dengan mencatat langsung, mengcopy dan mendownload dari sumber *website* yang bersangkutan.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian di tarik kesimpulanya.⁴ Populasi yang akan diambil dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dan diambil melalui data BPS Provinsi Lampung berdasarkan jangka waktu yaitu PDRB perkapita dan Kemiskinan (jumlah penduduk miskin) daerah otonomi baru (Kabupaten Pringsewu, Mesuji dan Tulang Bawang Barat).

⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, cetakan ke-5 (Bandung:Alfabeta), h.174

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian.⁵ Dalam hal ini penulis menggunakan sampel 8 tahun terakhir yaitu tahun 2004-2007 dan 2013-2016.

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah *Purposive Sampling* yaitu teknik yang menentukan sampel dalam pertimbangan atau kriteria tertentu.⁶ Kriteria yang digunakan sebagai sampel yaitu PDRB perkapita dan Kemiskinan (jumlah penduduk miskin) daerah otonomi baru (Kabupaten Pringsewu, Mesuji dan Tulang Bawang Barat).

E. Variabel dan Definisi Operasional Penelitian

Operasional variabel adalah penjelasan mengenai cara-cara tertentu yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur (mengoperasionalkan) *construct* menjadi variabel penelitian yang dapat dituju. Kerlinger menyatakan bahwa variabel adalah kontruk (*Contructs*) atau sifat yang akan di pelajari.⁷ Sehingga memungkinkan Peneliti yang lain untuk melakukan replikasi (pengulangan) pengukuran dengan cara yang sama, atau mencoba mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik.

⁵ Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015), h.81

⁶ Suharmis Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), h.183

⁷ *Ibid* h.38

1. Pemekaran wilayah/ daerah adalah pemisahan dari suatu daerah dari induknya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan meningkatkan dan mempercepat pelayanan, kehidupan demokrasi dan hubungan yang serasi antar daerah dan pusat. Pada hakekatnya pemekaran wilayah sebagai upaya peningkatan sumber daya secara berkelanjutan, meningkatkan keserasian perkembangan antar wilayah dan antar sektor. Memperkuat integrasi nasional yang secara keseluruhan dapat meningkatkan kualitas hidup.⁸

Sehingga pemekaran tersebut diharapkan ada sebuah dampak yang mempunyai pengaruh kuat yang dapat menimbulkan akibat sebagai berikut:

- a) Meningkatkan pendapatan perkapita. Maksudnya dengan pemekaran di Provinsi Lampung diharapkan dapat menciptakan anggota masyarakat suatu negara makin sejahteraan dan pembangunan perekonomian dinilai makin berhasil.
- b) Mengurangi kemiskinan. Maksudnya dengan dilakukannya pemekaran di Provinsi Lampung diharapkan mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk, misalnya potensi ekonomi yang selama ini tidak tergali akan tergali.

⁸ Saeful Anwar, *Op.Cit*, h.25

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi
Pemekaran Wilayah	Dalam bahasa hukum pemekaran daerah diartikan sebagai pemecahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota menjadi lebih dari satu daerah, berdasarkan kriteria kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.
Pendapatan Per Kapita	Pendapatan per kapita (<i>percapita income</i> /PCI) adalah pendapatan rata-rata untuk masing-masing penduduk dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Perhitungan pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk.
Kemiskinan	Kemiskinan adalah suatu permasalahan yang selalu melekat dengan kehidupan sehari-hari pada Negara terbelakang maupun berkembang.

F. Metode Analisis Data

Analisi data penelitian yang merupakan bagian dari proses pengujian dan setelah tahap pemilihan dan pengumpulan data peneliti. Proses analisis dan data peneliti umumnya terdiri dari beberapa tahap persiapan, analisis dan deskriptif dan pengujian hipotesis. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan software aplikasi statistik, yaitu SPSS (*Statistical Package of Social Science*) versi 16.0.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Termasuk dalam statistik

deskriptif adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean (pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi.⁹

2. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.¹⁰ Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian dan sebaiknya dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian. Model yang baik yang layak digunakan dalam penelitian ini adalah metode *kolmogrov smirnov* untuk mengetahui normal atau tidaknya data yang digunakan. Uji *kolmogrov smirnov* adalah uji beda antara data yang di uji normalitasnya dengan data normal baku.

G. Pengujian Hipotesis (Paired Sample T-Test)

Paired Sample T-Test adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan atau saling berkaitan. Pengertian lain menyebutkan bahwa *Paired sample t-test* merupakan uji t dimana sample yang digunakan saling berhubungan antara satu sample dengan sample yang lain.

Sample berpasangan diartikan sebagai sebuah sample dengan subyek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang

⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi*. (Bandung: Alfabeta, 2011), h.206

¹⁰ *Ibid*

berbeda seperti subyek A mendapat perlakuan I, kemudian perlakuan II. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji perbedaan rata-rata antara sampel-sampel yang berpasangan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Provinsi Lampung

Provinsi Lampung berdiri pada tanggal 18 Maret 1964 berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 1964 yang kemudian menjadi Undang-undang No 14 Tahun 1964. Sebelum itu Provinsi Lampung merupakan karisidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Lampung adalah Provinsi yang paling strategis karena Provinsi Lampung menjadi pintu gerbang masuk ke Pulau Sumatera untuk dapat menuju ke Provinsi-provinsi lainnya.

Visi Provinsi Lampung adalah: “Lampung Maju dan Sejahtera 2019”. Sedangkan Misi Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah
- b) Meningkatkan Infrastruktur Untuk Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial
- c) Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Budaya Masyarakat, dan Toleransi Kehidupan Beragam
 - 1) Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
 - 2) Transformasi Budaya Lampung dan Pemantapan Toleransi Kehidupan Beragam

- d) Meningkatkan Pelestarian Sumber Daya Alam dan Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan
- e) Menegakkan Supremasi Hukum, Membangun Peradaban Demokrasi dan Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme ASN.

Secara geografis, Provinsi Lampung terletak pada 103°40' samapai 105°50' Bujur Timur dan 6°45' samapi 3°45' Lintang Selatan, disebelah Utara berdasarkan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu, sebelah Selatan dengan Selatan Sunda, sebelah Timur dengan Laut Jawa dan Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia.

Daerah Lampung memiliki luas daratan 35.288,35 Km² termasuk pulau-pulau yang terletak pada bagian sebelah paling ujung tenggara pulau sumatera, dan dibatasi oleh:

- a) Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu di sebelah Utara
- b) Selat Sunda di sebelah Selatan
- c) Laut Jawa di sebelah Timur
- d) Samudera Indonesia di sebelah Barat

Bandar lampung sebagai ibukota Provinsi Lampung merupakan gabungan dari kota kembar Tanjungkarang dan Telukbetung. Provinsi Lampung memiliki populasi pendudukan ditahun 2010 sebanyak 7.608.405 jiwa. Pelabuhan utama bernama Panjang dan Bakauheni serta pelabuhan nelayan seperti Pasar Ikan (Telukbetung), Tarahan, dan Kalianda.

Secara Topografi, daerah Lampung memiliki lima unit topografis yaitu:

a) Daerah topografis berbukit sampai bergunung

Daerah ini meliputi bukit barisan dengan puncak tonjolan berada pada Gunung Tanggamus, Gunung Pesawaran dan Gunung Rajabasa dengan lereng curam 25% pada ketinggian rata-rata 300 m diatas permukaan air laut. Puncak-puncak lainnya ialah bukit pungung, bukit pesagi, sekinau yang terdapat dibagian utara dengan ketinggian rata-rata 1.500 m. Daerah-daerah tersebut ditutupi vegetasi hutan primer dan sekunder.

b) Daerah topografis berombak samapi bergelombang

Daerah ini meliputi gedong Tataan, Kedaton, Sukoharjo dan Pulau Panggung di Kabupaten Lampung Selatan dan Kalirejo, Bangunrejo di Kabupaten Lampung Tengah, kemiringan daerah ini antara 8%-15% dengan ketinggian 300 m hingga 500 m dpl. Vegetasi yang menutupi daerah ini tanaman perkebunan dan pertanian ladang.

c) Daerah daratan *alluvia* (tanah baru)

Daerah ini sangat luas meliputi Lampung Tengah sampai mendekati pantai sebelah timur yang merupakan bagian hilir (*down stream*) dari sungai-sungai yang besar seperti Way Sekampung, Way Tulang Bawang, Way Mesuji, ketinggian daerah ini antara 25 m sampai 75 m dari permukaan laut dengan kemiringan 0% sampai 3%

pada bagian pantai sebelah barat daratan alluvial menyempit dan memanjang mengikuti arah bukit barisan.

d) Daerah dataran rawa pasang surut

Rawa pasang surut terdapat disepanjang pantai laut timur dengan ketinggian 0,5 m sampai 1 m, penggenangan air menurut naiknya pasang surut air laut.

e) Daerah *river* basin

Daerah ini meliputi River Basin Tulang Bawang, Seputih, Sekampung, Semangka dan Way Jepara.

Secara administrasi Provinsi Lampung memiliki lima belas Kabupaten/Kota, yang kemudian terbagi kepada beberapa kecamatan yaitu:

- a) Kabupaten Lampung Barat dengan ibukotanya Liwa, luas wilayahnya 2.142,78 Km² terdiri dari lima belas kecamatan
- b) Kabupaten Tanggamus, Kota Agung sebagai ibukotanya dengan luas wilayah 3.020,64 Km² yang terdiri dari dua puluh kecamatan
- c) Kabupaten Lampung Selatan dengan ibukota Kalianda dengan luas wilayah 700,32 Km² terdiri dari tujuh belas kecamatan
- d) Kabupaten Lampung Timur dengan ibukota Sukadana dengan luas wilayah 5.325,03 Km² terdiri dari dua puluh empat kecamatan
- e) Kabupaten Lampung Tengah dengan ibukota Gunung Sugih, luas wilayahnya 3.802,68 Km² terdiri dari dua puluh delapan kecamatan

- f) Kabupaten Lampung Utara dengan ibukota Kotabumi dengan luas wilayahnya 2.725,84 Km² terdiri dari dua puluh tiga kecamatan
- g) Kabupaten Waykanan dengan ibukota Blambangan Umpu, dengan luas wilayah 3.921,63 Km² terdiri dari empat belas kecamatan
- h) Kabupaten Tulang Bawang dengan ibukota Menggala, dengan luas wilayah 3.466,32 Km² terdiri dari lima belas kecamatan
- i) Kabupaten Pesawaran dengan ibukota Gedong Tataan, dengan luas wilayah 2.243,51 Km² terdiri dari sebelas kecamatan
- j) Kabupaten Pringsewu dengan ibukota Pringsewu, dengan luas wilayah 625,500 Km² terdiri dari sembilan kecamatan
- k) Kabupaten Mesuji dengan ibukota Mesuji, dengan luas wilayah 3.921,63 Km² terdiri dari tujuh kecamatan
- l) Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan ibukota Panaragan Jaya, dengan luas wilayah 1.201,00 Km² terdiri dari delapan kecamatan
- m) Kabupaten Pesisir barat dengan ibukota Krui, dengan luas wilayah 2.907,23 Km² terdiri dari sebelas kecamatan
- n) Kabupaten Bandar Lampung dengan luas wilayah 296 Km² terdiri dari dua puluh kecamatan
- o) Kota Metro, dengan luas wilayah 61,79 Km² terdiri dari lima kecamatan

Secara *Geologi* punggung sebelah barat Lampung adalah bagian dari Bukit Barisan yang merupakan *Geantiklinal* dengan *Sinklinal* yang terdapat disebelah timurnya. Lapisan sedimen di sebelah timur ini

umumnya tertutup juga oleh endapan tiffa massam sebagian hasil dari debu gunung api di Bukit Barisan yang membentuk dataran Peneplain di bagian Timur Lampung.

Dari literatur dan peta Geologi daerah Lampung dapat diinventarisir adanya bahan-bahan tambang yaitu diantaranya Minyak Bumi, Uranium, Batubara Muda, Mineral Besi, Emas dan Perak, Marmer, Sumber Air Panas dan Gas Bumi.

Secara umum, adat masyarakat Lampung dibedakan menjadi dua yaitu masyarakat adat Saibatin yang berkediaman di sepanjang pesisir termasuk adat Krui, Ranau Komerling, sampai Kayu Agung, dan adat Pepadun yang berkediaman di daerah pedalaman Lampung terdiri dari masyarakat Abung (Abung Siwo Migo), Pubian (Pubian Telu Suku), Menggala/Tulang Bawang (Migo Pak) dan Buai Lima (Marga Bunga Mayang Sungkai).

2. Gambaran Umum Kabupaten Pringsewu

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tanggamus, dan dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 48 tahun 2008 tanggal 26 November 2008 dan diresmikan pada tanggal 3 April 2009 oleh Menteri Dalam Negeri yaitu Mardiyanto. Sebagai tindak lanjut berdirinya Kabupaten Pringsewu maka ditetapkan peraturan Bupati yaitu:

- a. Undang-undang No 48 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 185

Tambahan Lembaran Negara No 4932) diundangkan pada tanggal 28 November 2008.

- b. Peraturan Bupati No 01 tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat daerah Kabupaten Pringsewu, sekretariat perwakilan rakyat daerah Kabupaten Pringsewu (terbentuk bagian kepegawaian dan humas).
- c. Peraturan Bupati No 08 tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat daerah Kabupaten Pringsewu, sekretariat perwakilan rakyat daerah Kabupaten Pringsewu (Perubahan Bagian Kepegawaian dan Humas menjadi Bagian Kepegawaian).
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu No 03 tahun 2010 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kabupaten Pringsewu.

Berikut ini nama-nama sejak awal berdirinya Badan Kepegawaian dan Daerah (BKD) Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut:

- (1) Yus Amri Agus, Sos, memimpin sejak 04 Juli 2009 sampai 12 Juli 2010.
- (2) Bajuri, SH memimpin sejak 12 Juli 2010 sampai 15 November 2011.
- (3) Purwato, SH,MH memimpin sejak 18 Februari 2012 sampai 15 November 2012.
- (4) Budi Heryanto, SH,MM memimpin sejak 15 November 2012 – 10 Januari 2014.

(5) Drs. Muhammad Dawam, M.Si memimpin sejak 10 Januari 2014 sampai sekarang.

3. Gambaran Umum Kabupaten Mesuji

Kabupaten Mesuji merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Lampung yang diresmikan secara definitif pada tanggal 13 April 2012 hasil dari pemekaran Kabupaten Tulang Bawang. Kabupaten Mesuji memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang masuk dan keluar dari Provinsi Lampung menuju Provinsi lainnya di Pulau Sumatera melalui jalur Lintas Timur Sumatera.

Tahun 1982, Program Transmigrasi mulai ditempatkan di wilayah ini kemudian dilanjutkan pada tahun 1985 dan tahun 1992. Waktu itu, wilayah Mesuji masih merupakan bagian wilayah Kabupaten Lampung Utara. Pada tahun 1997, Kabupaten Lampung Utara dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten, yaitu Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Tulang Bawang. Kabupaten Mesuji akhirnya masuk sebagai bagian di Kabupaten Tulang Bawang.

Seiring dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks lokal. Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang yang berasal dari 7 Kecamatan (Mesuji, Mesuji Timur, Tanjung Raya, Panca Jaya, Simpang Pematang, Way Serdang, dan Rawajitu Utara) berinisiatif untuk memekarkan wilayahnya tersebut menjadi Kabupaten baru. Upaya kolektif tersebut diprakarsai oleh Tim Formatur Pembentukan Panitia Pelaksana Persiapan Kabupaten Mesuji (disebut Tim Sembilan) pada tanggal 12

Februari 2005 yang beranggotakan: Ishak, Jaswani, Drs. Marzuki, Drs. Abdul Karim Mahfudz, Mat Jaya, Wasito, S.Pd, Mulkipli, Sugiarto, S.Pd., dan Sabariman. Selanjutnya terbentuklah Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Mesuji (P3KM).

Melalui proses yang cukup panjang dan didukung oleh berbagai pihak maka dalam Sidang Paripurna DPR-RI tanggal 29 Oktober 2008, Mesuji disahkan Menjadi sebuah Kabupaten, yang tertuang dalam Undang-undang No 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung yang diundangkan pada tanggal 26 November 2008. Pada tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari jadi Kabupaten Mesuji. Kemudian untuk menjalankan Permendagri No 66 tahun 2011 untuk Kabupaten ini yang berguna untuk mendukung perangkat kerja Kabupaten Mesuji tersebut.

Tanggal 28 September 2011, Kabupaten Mesuji menggelar Pemilukada atau pesta demokrasi untuk pemilihan Bupati pertama yang akan memimpin Kabupaten tersebut. pemilihan tersebut yang di fasilitasi oleh KPU setempat, pasangan H. Khamamik-Ismail Ishak terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati pertama di Kabupaten Mesuji ini. Dikarenakan sesuatu dan lain hal, pelantikan yang dilakukan atas nama Menteri Dalam Negeri oleh Gubernur Lampung pada hari jumat tanggal 13 April 2012 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Manggala, Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.

4. Gambaran Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat

Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang. Kabupaten Tulang Bawang sendiri mempunyai luas wilayah $\pm 6.851,32 \text{ km}^2$ dengan jumlah penduduk pada tahun 2007 berjumlah 860.854 jiwa, terdiri atas 28 (dua puluh delapan) kecamatan. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintah melalui pembentukan daerah otonomi baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang terdiri atas 8 (delapan) kecamatan, yaitu Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Lambu Kibang, Kecamatan Gunung Terang, Kecamatan Tumijajar, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Gunung Agung, Kecamatan Way Kenanga, dan Kecamatan Pagar Dewa. Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki luas wilayah keseluruhan $\pm 1.201,00 \text{ km}^2$ dengan jumlah penduduk ± 233.360 jiwa pada tahun 2006.

Kabupaten Tulang Bawang Barat diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto, pada 29 Oktober 2008 berdasarkan

Undang-undang Republik Indonesia No 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat Di Provinsi Lampung tanggal 26 November 2008.

5. Pendapatan Per Kapita

Salah satu komponen dari pendapatan nasional yang selalu dilakukan perhitungannya adalah pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita yaitu pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan perkapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada periode tertentu. Pendapatan perkapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut.

Rata-rata PDRB Per Kapita DOB di Provinsi Lampung pada tahun 2004-2007 dan 2013-2016 terbesar berada di tahun 2016 dimana Kabupaten Pringsewu tingkat PDRB perkapita mencapai Rp. 22,78 juta, Kabupaten Mesuji mencapai Rp. 41,20 juta, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat mencapai Rp. 33,86 juta, dan rata-rata terendah berada di tahun 2004 dimana Kabupaten Pringsewu mencapai Rp. 3.77 juta, Kabupaten Mesuji dan Tulang Bawang Barat mencapai Rp. 6.12 juta.

Tabel di bawah ini dijelaskan Pendapatan Per Kapita daerah otonomi baru (Kabupaten Pringsewu, Mesuji, dan Tulang Bawang Barat) di Provinsi Lampung Tahun 2004-2016, empat tahun sebelum pemekaran (2004-2007) dengan empat tahun sesudah pemekaran (2013-2016):

Tabel 4.1
PDRB Per Kapita Kapita DOB di Provinsi Lampung
Tahun 2004-2007 dan Tahun 2013-2016 (Ribu Rp)

No	Tahun	DOB Pringsewu	DOB Mesuji	DOB Tulang Bawang Barat
1.	2004	3.772,88	6.121,94	6.121,94
2.	2005	4.235,95	7.182,23	7.182,23
3.	2006	4.845,36	8.442,77	8.442,77
4.	2007	5.757,90	10.224,39	10.224,39
	2008	Pemekaran Wilayah		
5.	2013	17.027,82	30.251,79	25.563,76
6.	2014	19.211,78	34.031,78	28.237,50
7.	2015	20.905,44	37.260,48	30.647,31
8.	2016	22.780,22	41.209,04	33.868,64

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung Tahun 2004-2016

6. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu situasi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya dalam sehari-hari. Kemiskinan sangat sulit dihindari terlebih pada negara berkembang. Kemiskinan bukan saja sebatas kekurangan ekonomi akan tetapi juga keterbatasan mendapatkan perlakuan dari lingkungan masyarakat. Sebagian besar masyarakat masih hidup dalam kelompok dimana mereka hanya mau bergaul dengan kelompok masyarakat yang sederajat. Sehingga banyak kelompok masyarakat kecil yang merasa terasingkan. Kesenjangan antara si kaya dan miskin sangat jelas terlihat oleh status sosial. Apalagi masyarakat yang hidup di wilayah perkotaan yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin terperangkap dipinggiran kota dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, disini pemerintah memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar, pemerintah tentunya dengan dukungan masyarakat harus berupaya untuk melakukan

kabijakan yang dapat menuntaskan atau mengurangi angka kemiskinan yang terjadi di Provinsi Lampung.

Rata-rata tingkat kemiskinan daerah otonomi baru (Kabupaten Pringsewu, Mesuji, dan Pringsewu) di Provinsi Lampung bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun, rata-rata tingkat kemiskinan tertinggi adalah tahun 2007 dimana Kabupaten Pringsewu tingkat Kemiskinan mencapai Rp. 188.20 ribu jiwa, tahun 2006 Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat mencapai Rp. 106.10 ribu jiwa, dan rata-rata terendah berada di tahun 2013 dimana Kabupaten Pringsewu mencapai Rp. 37.31 ribu jiwa, Kabupaten Mesuji mencapai Rp. 11.23 ribu jiwa dan Tulang Bawang Barat mencapai Rp. 16.43 ribu jiwa.

Dibawah ini disajikan data Kemiskinan daerah otonomi baru di Provinsi Lampung dalam kurun waktu delapan tahun terakhir, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Penduduk Miskin DOB Di Provinsi Lampung Tahun 2004 2007
dan Tahun 2013-2016 (Ribu Jiwa)

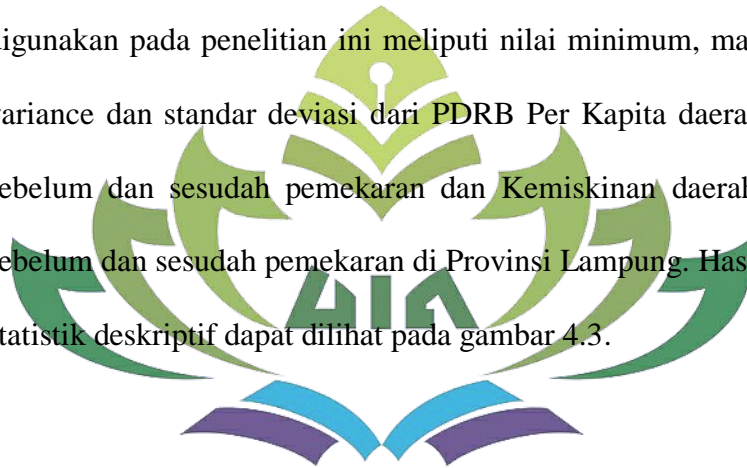
No	Tahun	DOB Pringsewu	DOB Mesuji	DOB Tulang Bawang Barat
1.	2004	-	-	-
2.	2005	167.30	122	122
3.	2006	181	106.10	106.10
4.	2007	188.20	103.60	103.60
	2008	Pemekaran Wilayah		
5.	2013	37.31	11.23	16.43
6.	2014	37.77	12.79	18.73
7.	2015	45.60	16	21.80
8.	2016	45.72	15.74	22.39

Sumber : *Badan Statistik Pusat Provinsi Lampung Tahun 2004-2016*

B. Analisis Data

1. Statistik deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Data yang diambil untuk penelitian ini adalah dari tahun 2004-2007 dan 2013-2016 yaitu sebanyak 8 data pengamatan. Deskripsi variabel dalam statistik deskriptif yang digunakan pada penelitian ini meliputi nilai minimum, maksimum, mean, variance dan standar deviasi dari PDRB Per Kapita daerah otonomi baru sebelum dan sesudah pemekaran dan Kemiskinan daerah otonomi baru sebelum dan sesudah pemekaran di Provinsi Lampung. Hasil Uji Distribusi statistik deskriptif dapat dilihat pada gambar 4.3.



a) **PDRB Per Kapita Daerah Otonomi Baru (DOB)**

(1) **Kabupaten Pringsewu**

Tabel 4.3
Hasil Deskriptif Statistik
PDRB Perkapita Kabupaten Pringsewu

Statistics		
	Sebelum Pemekaran Wilayah	Sesudah Pemekaran Wilayah
N Valid	4	4
Missing	0	0
Mean	4.6522	19.9808
Std. Deviation	.85763	2.44998
Variance	.736	6.002
Minimum	3.77	17.03
Maximum	5.76	22.78

Sumber : Data Sekunder diolah tahun 2018

Berdasarkan hasil uji Deskriptif Statistik diatas, diketahui rata-rata masing-masing variabel berada pada angka positif. Dapat dilihat bahwa selama periode pengamatan, PDRB Per Kapita Kabupaten Pringsewu sebelum pemekaran nilai rata-rata sebesar 4.6522 dengan standar deviasi sebesar 0.857663 dan variance sebesar 0.736. PDRB Per Kapita Kabupaten Pringsewu setelah pemekaran nilai rata-rata sebesar 19.9808 dengan standar deviasi sebesar 2.44998 dan variance sebesar 6.002.

(2) Kabupaten Mesuji

Tabel 4.4
Hasil Deskriptif Statistik
PDRB Perkapita Kabupaten Mesuji

Statistics		
	Sebelum Pemekaran Wilayah	Sesudah Pemekaran Wilayah
N Valid	4	4
Missing	0	0
Mean	7.9922	35.6878
Std. Deviation	1.76456	4.66402
Variance	3.114	21.753
Minimum	6.12	30.25
Maximum	10.22	41.21

Sumber : Data Sekunder diolah tahun 2018

Berdasarkan hasil uji Deskriptif Statistik diatas, diketahui rata-rata masing-masing variabel berada pada angka positif. Dapat dilihat bahwa selama periode pengamatan, PDRB Per Kapita Kabupaten Mesuji sebelum pemekaran nilai rata-rata sebesar 7.9922 dengan standar deviasi sebesar 1.76456 dan variance sebesar 3.114. PDRB Per Kapita Kabupaten Mesuji setelah pemekaran nilai rata-rata sebesar 35.6878 dengan standar deviasi sebesar 4.66402 dan variance sebesar 21.753.

(3) Kabupaten Tulang Bawang Barat

Tabel 4.5
Hasil Deskriptif Statistik
PDRB Perkapita Kabupaten Tulang Bawang Barat

		Statistics	
		Sebelum Pemekaran Wilayah	Sesudah Pemekaran Wilayah
N	Valid	4	4
	Missing	0	0
Mean		7.9922	29.5788
Std. Deviation		1.76456	3.53390
Variance		3.114	12.488
Minimum		6.12	25.56
Maximum		10.22	33.87

Sumber : Data Sekunder diolah tahun 2018

Berdasarkan hasil uji Deskriptif Statistik diatas, diketahui rata-rata masing-masing variabel berada pada angka positif. Dapat dilihat bahwa selama periode pengamatan, PDRB Per Kapita Kabupaten Tulang Bawang Barat sebelum pemekaran nilai rata-rata sebesar 7.9922 dengan standar deviasi sebesar 1.76456 dan variance sebesar 3.114. PDRB Per Kapita Kabupaten Tulang Bawang Barat setelah pemekaran nilai rata-rata sebesar 29.5788 dengan standar deviasi sebesar 3.53390 dan variance sebesar 12.488.

b) Kemiskinan Daerah Otonomi Baru (DOB)

(1) Kabupaten Pringsewu

Tabel 4.6
Hasil Deskriptif Statistik
Kemiskinan Kabupaten Pringsewu

		Statistics	
		Sebelum Pemekaran Wilayah	Sesudah Pemekaran Wilayah
N	Valid	3	4
	Missing	1	0
Mean		178.8333	41.6000
Std. Deviation		10.61712	4.69210
Variance		112.723	22.016
Minimum		167.30	37.31
Maximum		188.20	45.72

Sumber : Data Sekunder diolah tahun 2018

Berdasarkan hasil uji Deskriptif Statistik diatas, diketahui rata-rata masing-masing variabel berada pada angka positif. Dapat dilihat bahwa selama periode pengamatan, Kemiskinan Kabupaten Pringsewu sebelum pemekaran nilai rata-rata sebesar 178.8333 dengan standar deviasi sebesar 10.61712 dan variance sebesar 112.723. Kemiskinan Kabupaten Pringsewu setelah pemekaran nilai rata-rata sebesar 41.6000 dengan standar deviasi sebesar 4.69210 dan variance sebesar 22.016.

(2) Kabupaten Mesuji

Tabel 4.7
Hasil Deskriptif Statistik
Kemiskinan Kabupaten Mesuji

Statistics		
	Sebelum Pemekaran Wilayah	Sesudah Pemekaran Wilayah
N Valid	3	4
Missing	1	0
Mean	110.5667	13.9400
Std. Deviation	9.98015	2.32022
Variance	99.603	5.383
Minimum	103.60	11.23
Maximum	122.00	16.00

Sumber : Data Sekunder diolah tahun 2018

Berdasarkan hasil uji Deskriptif Statistik diatas, diketahui rata-rata masing-masing variabel berada pada angka positif. Dapat dilihat bahwa selama periode pengamatan, Kemiskinan Kabupaten Mesuji sebelum pemekaran nilai rata-rata sebesar 110.5667 dengan standar deviasi sebesar 9.98015 dan variance sebesar 99.603. Kemiskinan Kabupaten Mesuji setelah pemekaran nilai rata-rata sebesar 13.9400 dengan standar deviasi sebesar 2.32022 dan variance sebesar 5.383.

(3) Kabupaten Tulang Bawang Barat

Tabel 4.8
Hasil Deskriptif Statistik
Kemiskinan Kabupaten Tulang Bawang Barat

Statistics		
	Sebelum Pemekaran Wilayah	Sesudah Pemekaran Wilayah
N Valid	3	4
Missing	1	0
Mean	110.5667	19.8375
Std. Deviation	9.98015	2.78114
Variance	99.603	7.735
Minimum	103.60	16.43
Maximum	122.00	22.39

Sumber : Data Sekunder diolah tahun 2018

Berdasarkan hasil uji Deskriptif Statistik diatas, diketahui rata-rata masing-masing variabel berada pada angka positif. Dapat dilihat bahwa selama periode pengamatan, Kemiskinan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebelum pemekaran nilai rata-rata sebesar 110.5667 dengan standar deviasi sebesar 9.98015 dan variance sebesar 99.603. Kemiskinan Kabupaten Tulang Bawang Barat setelah pemekaran nilai rata-rata sebesar 19.8375 dengan standar deviasi sebesar 2.78114 dan variance sebesar 7.735.

2. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian dan sebaiknya dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian. Model yang baik yang layak digunakan dalam penelitian ini adalah metode *kolmogrov smirnov* untuk mengetahui normal atau tidaknya data yang digunakan. Uji *kolmogrov smirnov* adalah uji beda antara data yang di uji normalitasnya dengan data normal baku. Hasil Uji Normalitas dengan metode *kolmogrov smirnov* dapat dilihat pada gambar 4.3

a) **PDRB Per Kapita Daerah Otonomi Baru (DOB)**

(1) **Kabupaten Pringsewu**

Tabel 4.9
Hasil Uji Normalitas
PDRB Perkapita Kabupaten Pringsewu

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	0,596
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,869

Sumber : Data Sekunder diolah tahun 2018

Berdasarkan hasil uji normalitas diatas, diketahui nilai signifikansi pada *Asymp. Sig.(2-tailed)* diperoleh sebesar 0,869 artinya nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual pada PDRB Per Kapita Kabupaten Pringsewu berdistribusi normal.

(2) Kabupaten Mesuji

Tabel 4.10
Hasil Uji Normalitas
PDRB Perkapita Kabupaten Mesuji

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	0,561
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,911

Sumber : Data Sekunder diolah tahun 2018

Berdasarkan hasil uji normalitas diatas, diketahui nilai signifikansi pada *Asymp. Sig.(2-tailed)* diperoleh sebesar 0,911 artinya nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual pada PDRB Per Kapita Kabupaten Mesuji berdistribusi normal.

(3) Kabupaten Tulang Bawang Barat

Tabel 4.11
Hasil Uji Normalitas
PDRB Perkapita Kabupaten Tulang Bawang Barat

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	0,479
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,976

Sumber : Data Sekunder diolah tahun 2018

Berdasarkan hasil uji normalitas diatas, diketahui nilai signifikansi pada *Asymp. Sig.(2-tailed)* diperoleh sebesar 0,976 artinya nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual pada PDRB Per Kapita Kabupaten Tulang Bawang Barat berdistribusi normal.

b) Kemiskinan Daerah Otonomi Baru (DOB)

(1) Kabupaten Pringsewu

Tabel 4.12
Hasil Uji Normalitas
Kemiskinan Kabupaten Pringsewu

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	0,552
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,920

Sumber : Data Sekunder diolah tahun 2018

Berdasarkan hasil uji normalitas diatas, diketahui nilai signifikansi pada *Asymp. Sig.(2-tailed)* diperoleh sebesar 0,920 artinya nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual pada PDRB Per Kapita Kabupaten Pringsewu berdistribusi normal.

(2) Kabupaten Mesuji

Tabel 4.13
Hasil Uji Normalitas
Kemiskinan Kabupaten Mesuji

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	0,388
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,998

Sumber : Data Sekunder diolah tahun 2018

Berdasarkan hasil uji normalitas diatas, diketahui nilai signifikansi pada *Asymp. Sig.(2-tailed)* diperoleh sebesar 0,998 artinya nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual pada PDRB Per Kapita Kabupaten Mesuji berdistribusi normal.

(3) Kabupaten Tulang Bawang Barat

Tabel 4.14
Hasil Uji Normalitas
Kemiskinan Kabupaten Tulang Bawang Barat

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	0,388
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,998

Sumber : Data Sekunder diolah tahun 2018

Berdasarkan hasil uji normalitas diatas, diketahui nilai signifikansi pada *Asymp. Sig.(2-tailed)* diperoleh sebesar 0,998 artinya nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual pada PDRB Per Kapita Kabupaten Tulang Bawang Barat berdistribusi normal.

C. Pengujian Hipotesis (Paired Sample T-Test)

Paired Sample T-Test adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling berpasangan atau saling berkaitan. Sample berpasangan diartikan sebagai sebuah sample dengan subyek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda seperti subyek A mendapat perlakuan I, kemudian perlakuan II. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji perbedaan rata-rata antara sampel-sampel yang berpasangan.

a) **PDRB Per Kapita Daerah Otonomi Baru (DOB)**

(1) **Kabupaten Pringsewu**

Tabel 4.15
Hasil Uji *Paired Sample T-Test*
PDRB Perkapita Kabupaten Pringsewu

Paired Samples Test								
	Paired Differences					T	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Sebelum Pemekaran Wilayah - Sesudah Pemekaran Wilayah	-1.53285E1	1.61556	.80778	-17.89921	-12.75779	-18.976	3	.000

Sumber : Data Sekunder diolah tahun 2018

Uji Paired sampel t-test terjadi jika:

- (a) Jika nilai sig. (2-tailed) $> 0,05$, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikansi antara PDRB Perkapita Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung sebelum dan sesudah pemekaran wilayah.
- (b) Jika nilai sig. (2-tailed) $< 0,05$, maka terdapat perbedaan yang signifikansi antara PDRB Perkapita Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung sebelum dan sesudah pemekaran wilayah.

Berdasarkan hasil uji paired diatas menggunakan SPSS 16.0 diperoleh nilai sig. (2-tailed) sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara PDRB Perkapita Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung sebelum dan sesudah pemekaran wilayah.

(2) Kabupaten Mesuji

Tabel 4.16
Hasil Uji Paired Sample T-Test
PDRB Perkapita Kabupaten Mesuji

Paired Samples Test								
	Paired Differences					T	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Sebelum Pemekaran Wilayah - Sesudah Pemekaran Wilayah	-2.76955E1	2.91606	1.45803	-32.33560	-23.05540	-18.995	3	.000

Sumber : Data Sekunder diolah tahun 2018

Berdasarkan hasil uji paired diatas menggunakan SPSS 16.0 diperoleh nilai sig. (2-tailed) sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara PDRB Perkapita Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung sebelum dan sesudah pemekaran wilayah.

(3) Kabupaten Tulang Bawang Barat

Tabel 4.17
Hasil Uji Paired Sample T-Test
PDRB Perkapita Kabupaten Tulang Bawang Barat

Paired Samples Test								
	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Sebelum Pemekaran Wilayah - Sesudah Pemekaran Wilayah	-2.15865E1	1.77925	.88963	-24.41769	-18.75531	-24.265	3	.000

Sumber : Data Sekunder diolah tahun 2018

Berdasarkan hasil uji paired diatas menggunakan SPSS 16.0 diperoleh nilai sig. (2-tailed) sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara PDRB Perkapita Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung sebelum dan sesudah pemekaran wilayah.

b) Kemiskinan Daerah Otonomi Baru (DOB)

(1) Kabupaten Pringsewu

Tabel 4.18
Hasil Uji *Paired Sample T-Test*
Kemiskinan Kabupaten Pringsewu

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Sebelum Pemekaran Wilayah - Sesudah Pemekaran Wilayah	1.35803E2	6.48441	3.74378	119.69515	151.91151	36.274	2	.001

Sumber : Data Sekunder diolah tahun 2018

Uji Paired sampel t-test terjadi jika:

- 1) Jika nilai sig. (2-tailed) $> 0,05$, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikansi antara Kemiskinan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung sebelum dan sesudah pemekaran wilayah.
- 2) Jika nilai sig. (2-tailed) $< 0,05$, maka terdapat perbedaan yang signifikansi antara Kemiskinan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung sebelum dan sesudah pemekaran wilayah.

Berdasarkan hasil uji paired diatas menggunakan SPSS 16.0 diperoleh nilai sig. (2-tailed) sebesar $0,001 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara Kemiskinan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung sebelum dan sesudah pemekaran wilayah.

(2) Kabupaten Mesuji

Tabel 4.19
Hasil Uji Paired Sample T-Test
Kemiskinan Kabupaten Mesuji

Paired Samples Test								
	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Sebelum Pemekaran Wilayah - Sesudah Pemekaran Wilayah	9.57233E1	11.73337	6.77427	66.57602	124.87065	14.130	2	.005

Sumber : Data Sekunder diolah tahun 2018

Berdasarkan hasil uji paired diatas menggunakan SPSS 16.0 diperoleh nilai sig. (2-tailed) sebesar $0,005 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara Kemiskinan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung sebelum dan sesudah pemekaran wilayah.

(3) Kabupaten Tulang Bawang Barat

Tabel 4.20
Hasil Uji Paired Sample T-Test
Kemiskinan Kabupaten Tulang Bawang Barat

Paired Samples Test									
		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Sebelum Pemekaran Wilayah - Sesudah Pemekaran Wilayah	8.95933E1	11.94468	6.89627	59.92110	119.26557	12.992	2	.006

Sumber : Data Sekunder diolah tahun 2018

Berdasarkan hasil uji paired diatas menggunakan SPSS 16.0 diperoleh nilai sig. (2-tailed) sebesar $0,006 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara Kemiskinan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung sebelum dan sesudah pemekaran wilayah.

D. Pembahasan**1. Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap PDRB Per Kapita****Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Lampung**

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa ada perbedaan rata-rata PDRB Per Kapita Kabupaten Pringsewu, Mesuji, dan Tulang Bawang Barat diantara kondisi sebelum dan sesudah pemekaran di Provinsi Lampung. Hal ini ditunjukkan oleh PDRB Per Kapita Kabupaten Pringsewu, Mesuji, dan Tulang Bawang Barat diantara kondisi sebelum dan sesudah pemekaran sebesar 0,000. Ini berarti bahwa $0,000 < 0,05$

sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara PDRB Per Kapita Kabupaten Pringsewu, Mesuji, dan Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung sebelum dan sesudah pemekaran wilayah.

Kuncoro berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata produk suatu Negara pada waktu tertentu, nilainya diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut. Manfaat yang diperoleh dari menghitung pendapatan perkapita adalah 1) dapat mengetahui tingkat perekonomian suatu negara, jika pendapatan per kapita tinggi berarti perekonomian sudah maju, demikian pula sebaliknya, 2) dapat melihat perkembangan perekonomian dan kemakmuran suatu negara, dengan cara membandingkan besarnya pendapatan per kapita dari tahun ketahun, 3) dapat membandingkan tingkat kemakmuran (standar hidup) antar-negara, apakah tergolong kelompok rendah, menengah atau tinggi.

PDRB Perkapita daerah otonomi baru di Provinsi Lampung dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 sesudah pemekaran wilayah tingkat pendapatan PDRB perkapita daerah oronomi baru di Provinsi Lampung relatif tinggi. Tingkat tertinggi ditahun 2016 dimana Kabupaten Pringsewu tingkat PDRB perkapita mencapai Rp. 22,78 juta, Kabupaten Mesuji mencapai Rp. 41,20 juta, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat mencapai Rp. 33,86 juta.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan dilakukan oleh Murniati dengan judul penelitian “Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pendapatan Perkapita di Kabupaten Kerinci”. Metode yang digunakan metode deskriptif kuantitatif dengan hasil penelitian bahwa terdapat perbedaan Pendapatan Per Kapita di Kabupaten Kerinci Tahun 2005-2013, empat tahun sebelum pemekaran (2005-2008) dengan empat tahun sesudah pemekaran (2010-2013), ini dibuktikan dengan $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $9,991 > 3,18245$. Dapat digeneralisasikan bahwa kebijakan pemekaran wilayah mempunyai dampak terhadap pertumbuhan PDRB Perkapita daerah otonomi baru (DOB), yang sekaligus juga dapat dikatakan mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk di Provinsi Lampung.

Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa ada perbedaan rata-rata Kemiskinan Kabupaten Pringsewu, Mesuji, dan Tulang Bawang Barat diantara kondisi sebelum dan sesudah pemekaran di Provinsi Lampung. Hal ini ditunjukkan oleh Kemiskinan Kabupaten Pringsewu diantara kondisi sebelum dan sesudah pemekaran sebesar 0,001, Kabupaten Mesuji diantara kondisi sebelum dan sesudah pemekaran sebesar 0,005, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat diantara kondisi sebelum dan sesudah pemekaran sebesar 0,006. Ini berarti bahwa 0,001, 0,005, 0,006 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara Kemiskinan Kabupaten Pringsewu, Mesuji, dan

Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung sebelum dan sesudah pemekaran wilayah.

Kemiskinan pada umumnya merupakan salah satu permasalahan yang tidak saja dialami oleh negara berkembang namun dinegara maju pun kemiskinan suatu masalah yang pelik untuk diselesaikan. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) Kemiskinan mempunyai karakteristik yaitu tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain, bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar / arang / minyak tanah, hanya mengkonsumsi daging / susu / ayam satu kali dalam seminggu, hanya membeli satu stel baju dalam setahun dan hanya sanggup makan satu sampai dua kali dalam sehari.

Kemiskinan daerah otonomi baru di Provinsi Lampung setiap tahun mengalami fluktuasi. Ini terjadi sebelum pemekaran tahun 2007 jumlah penduduk miskin Kabupaten Pringsewu sebesar 188.20 ribu jiwa, Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 103.60 ribu jiwa. Namun setelah banyak dilakukan pemekaran keadaan ditahun 2013 terjadi penurunan Kabupaten Pringsewu sebesar 37.31 ribu jiwa, Mesuji sebesar 11.23 ribu jiwa dan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 16.43 ribu jiwa.

Kabupaten Pringsewu memiliki potensi baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dilihat dari sentra hasil pertanian berupa hasil hortikultura, pangan, peternakan, perdagangan, dan pertambangan. Tetapi pada kenyataannya menurut data yang diperoleh

dari BPS Provinsi Lampung Kondisi kemiskinan Kabupaten Pringsewu setelah dilakukannya pemekaran tiap tahunnya meningkat. Hal ini disebabkan sempitnya lapangan kerja serta masyarakat tidak mampu meraih peluang ekonomi, masyarakat tidak memiliki SDM yang memadai dan Kebijakan pemerintah yang kurang mendukung terhadap perkembangan ekonomi masyarakat. Untuk penanggulangan kemiskinan, maka dilakukan Kampung Tematik dengan cara pelatihan juga bagi mereka yang belum punya ketrampilan dan selanjutnya ada pendampingan, agar bisa berkembang lebih baik.

Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki potensi dari sektor pertanian dan perkebunan. Rusaknya infrastruktur menghambat peningkatan kualitas pelayanan masyarakat sehingga akses menjadi terhambat. Untuk saat ini Kabupaten Tulang Bawang Barat masih mengembangkan pembangunan infrastruktur diantaranya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan keberdayaan kualitas pelayanan dan mengembangkan perekonomian daerah untuk memperluas kesempatan kerja.

Masyarakat di Kabupaten Mesuji bukan tanpa masalah. Dengan komposisi penduduk yang beragam, potensi ekonomi yang kaya, sumber daya alam yang luas, tapi persoalan yang muncul kian banyak. Masalah kemiskinan adalah persoalan yang tidak terelakkan. Adapun penyebab dari beragam persoalan tersebut adalah masih banyak masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan kurangnya sumber penghasilan, kurangnya

lapangan kerja, harga hasil bumi anjlok disebabkan jalan rusak, dan kurangnya perhatian tempat pendidikan agama atau pondok pesantren.

Persoalan ini harus segera dicari jalan keluarnya. Segala daya dan upaya layak dilakukan untuk mengatasinya. Sehingga jeritan kemanusiaan, kemiskinan, penggusuran, tingginya tindak kejahatan tidak lagi menjadi bagian dari Kabupaten Mesuji. Sehingga terwujudlah masyarakat yang sejahtera, cerdas, aman, sehat dan bertaqwa yang mampu berpartisipasi dalam pembangunan di Kabupaten Mesuji bersama pemerintah. Dalam hal ini, hubungan pemerintah dan masyarakat sebagai partner yang saling mengisi. Dalam pembangunan, metode bottom up planing adalah sebuah keharusan, sehingga masyarakat dapat secara cerdas terlibat dan merasa bertanggungjawab dalam pembangunan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori BAPPEDA Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan oleh karena itu tingkat kemiskinan dapat mempengaruhi PDRB Perkapita. Hal ini disebabkan karena kemiskinan daerah otonomi baru (DOB) di Provinsi Lampung mengalami fluktuasi setiap tahun dan ini dapat dikatakan bahwa dengan dilakukannya pemekaran wilayah Kabupaten DOB di Provinsi Lampung sudah cukup baik dalam menanggulangi penurunan kemiskinan dan pemerintah harus memperhatikan lagi dan mengkaji ulang kategori tersebut, menentukan miskin atau kaya harus melihat lebih dalam keadaan keluarga tersebut dibandingkan hanya melihat bentuk fisiknya saja.

2. Dampak Pemekaran Wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kesejahteraan merupakan tujuan utama dalam suatu pembangunan. Tujuan dari pembangunan itu sendiri ialah mensejahterakan masyarakat baik pedesaan maupun di perkotaan. Namun, kesejahteraan tidak hanya diukur dengan besarnya pendapatan Nasional dan per kapita saja tetapi juga bagaimana pendapatan Nasional didistribusikan dengan merata, masalah ini masalah keadilan. Prinsip keadilan ini yang harus diperankan pemerintah Lampung meliputi seluruh aspek kehidupan mulai dari aspek agama, sosial, pendidikan, kesehatan, hukum, politik, sampai ke aspek ekonomi.

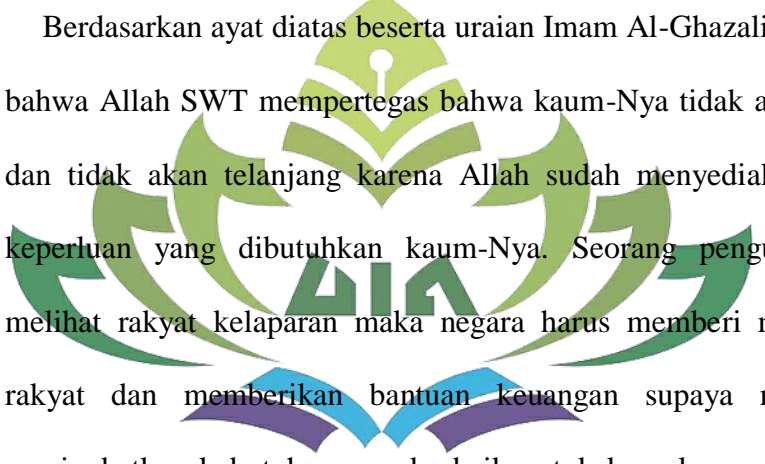
Islam menentukan fungsi pokok negara dan pemerintahan dalam bidang ekonomi, yaitu menghapuskan kesulitan ekonomi yang dialami rakyat, memberi kemudahan pada akses pengembangan ekonomi kepada seluruh lapisan rakyat dan menciptakan kemakmuran. Al-Qur'an memaklumkan tujuan negara dalam bidang ekonomi ini:

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ۖ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ ﴿١١٨﴾

Artinya: Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya". (Thaha : 118-119)

Dalam kaitan ini, Imam Al-Ghazali menguraikan tanggungjawab sosial ekonomi negara :

“Tanggungjawab pengusaha adalah membantu rakyat ketika mereka menghadapi kelangkaan pangan, kelaparan dan penderitaan, khususnya ketika terjadi kekeringan atau ketika harga tinggi sampai rakyat mendapatkan penghasilan kembali, karena dalam keadaan tersebut sulit bagi mereka memenuhi dua tujuan tersebut. Dalam kondisi tersebut negara harus memberi makanan kepada rakyat dan memberikan bantuan keuangan kepada mereka dari kekayaan negara supaya mereka dapat meningkatkan pendapatan mereka”.



Berdasarkan ayat diatas beserta uraian Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa Allah SWT mempertegas bahwa kaum-Nya tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang karena Allah sudah menyediakan keperluan yang dibutuhkan kaum-Nya. Seorang pengusaha apabila melihat rakyat kelaparan maka negara harus memberi makan kepada rakyat dan memberikan bantuan keuangan supaya mereka dapat meningkatkan kebutuhan mereka baik untuk keperluan sehari-hari atau modal untuk membuka usaha. Negara harus meningkatkan distribusi pendapatan secara merata, sehingga tercapainya masyarakat yang sejahtera.

Islam membahas kemiskinan muncul banyak pengertian disebabkan tolak ukur kemiskinan yang digunakan berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Demikian juga dengan Islam. Menurut Al-Ghazali, mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seorang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri baik dari kehidupan material

dan kebutuhan rohani. Argumen tersebut juga dibuat oleh Ahmed, kemiskinan bukan hanya merupakan perampasan barang dan jasa, tetapi juga kurangnya kemiskinan dalam roh. Islam menganggap kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat. Al-Qur'an memberikan peringatan terhadap manusia yang melalaikan kemiskinan, seperti dalam surah Al-Maa'uun ayat 1-7:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾
وَلَا تَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ
عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

Artinya: 1. Taukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim, 3. Dan tidak mendorong memberi makan anak yatim, 4. Maka celakalah orang yang shalat, 5. (yaitu) orang-orang yang lalai terhadap shalatnya, 6. Yang berbuat ria, 7. Dan enggan (memberikan) bantuan.

Surah Al-Maa'uun ayat 1-7 menunjukkan bahwa kemiskinan itu berbeda sementara manusia itu ada. Banyak orang mengaku beragama dan shalat tetapi tidak ingin menolong orang-orang lemah dan miskin adalah termasuk kedalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Secara implisit pengertian tersebut mengandung makna bahwa kemiskinan dan ketidak miskin akan selalu ada agar manusia saling tolong menolong.

Allah swt juga berfirman dalam surah Al-Muddatstsir ayat 42-47:

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ
 نُطْعِمِ الْمَسْكِينِ ﴿٤٤﴾ وَكُنَّا خَوْضٌ مَعَ الْحَايِضِينَ ﴿٤٥﴾ وَكُنَّا نَكْذِبُ
 بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٤٦﴾ حَتَّىٰ أَتَيْنَا الْيَقِينَ ﴿٤٧﴾

Artinya: 42. Apakah yang memasukkan kamu kedalam Saq'ar (neraka)? 43. Mereka menjawab: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat, 44. Dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin, 45. Dan adalah kami membicarakan yang bathil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, 46. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan, 47. Hingga datang kepada kami kematian.

Ayat di atas mengemukakan sebab-sebab dicampakkannya segolongan manusia kedalam neraka di hari kemudian kelak. Salah satu dari sebab-sebab itu karena mereka tidak memberi makan kepada orang miskin atau tidak peduli terhadap penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang hidupnya melarat. Hal ini memberi petunjuk bahwa memberi makan kepada orang miskin atau kepedulian terhadap nasib orang yang melarat merupakan salah satu dari perintah agama yang harus ditegakan. Perintah ini memiliki kedudukan yang penting seperti halnya perintah agama kepada manusia agar menegakan shalat atau menyembah Allah SWT serta menjauhi semua larangannya.

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menjadi orang berkecukupan. Karena islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah, oleh karena itu umat islam sangat dianjurkan untuk memperoleh kehidupan yang layak dan berkecukupan, akan tetapi tetap pada sewajarnya dan tidak berlebihan.

Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengentaskan kemiskinan dalam berbagai macam cara diantaranya, yang *pertama* dengan peningkatan sektor riil dan menghapuskan riba. Penghapusan riba akan secara efektif menekan laju inflasi karena kita tidak terpengaruh oleh pergerakan suku bunga dan komoditi ekonomi global secara langsung. Dengan begitu kemampuan daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Pada saat yang sama islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk berniaga, pemerintah harus mampu mendukung dan menggerakkan kepada masyarakat untuk berwirausaha sehingga mereka mampu mengangkat perekonomian keluarga secara mandiri dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari tercukupi. *Kedua*, infrastruktur seperti fasilitas umum, pembangunan jalan umum, menjadi kebutuhan penting untuk mempermudah akses dan jalur ekonomi masyarakat semakin bagus akses jalan maka kegiatan ekonomi masyarakat juga akan semakin mudah dan cepat sehingga akan menghasilkan *feedback* yang lebih baik lagi. *Ketiga*, kesehatan dan pendidikan merupakan faktor utama dalam pembangunan ekonomi oleh karena itu pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap keduanya.

Dalam hal ini pemerintah mempunyai wewenang yang sangat besar untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara melakukan pendistribusian pendapatan secara menyeluruh dan adil kepada seluruh lapisan masyarakat. Apabila pembangunan berjalan lancar maka akan terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disajikan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan uji Statistik Paired Sampel T-Test menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara PDRB Perkapita daerah otonomi baru yaitu Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung sebelum dan sesudah pemekaran wilayah. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan nilai sig. (2-tailed) yang dilakukan menggunakan program SPSS 16.0 yaitu Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat sig. (2-tailed) = (0.000). Sedangkan kemiskinan menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara Kemiskinan daerah otonomi baru (DOB) di Provinsi Lampung sebelum dan sesudah pemekaran wilayah. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan nilai sig. (2-tailed) Kabupaten Pringsewu sebesar 0,001, Kabupaten Mesuji sebesar 0,005, dan Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 0,006.
2. Dampak pemekaran wilayah di Provinsi Lampung dalam perspektif ekonomi islam menunjukkan perubahan yang cukup baik. Islam menentukan fungsi pokok negara dan pemerintahan dalam bidang ekonomi, yaitu menghapuskan kesulitan ekonomi yang dialami rakyat, memberi kemudahan pada akses pengembangan ekonomi kepada seluruh

lapisan rakyat dan menciptakan kemakmuran. Sedangkan Islam menganggap kemiskinan merupakan suatu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat. Terdapat tiga cara mengatasi kemiskinan yaitu: peningkatan sektor riil dan menghapuskan riba, pembangunan infrastruktur, serta kesehatan dan pendidikan merupakan faktor utama dalam pembangunan ekonomi.

B. Saran

1. Perlu adanya program dan pembuatan kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk pembangunan Provinsi Lampung dan pengembangan ekonomi masyarakat serta penyelesaian masalah ekonomi yang ada di Provinsi Lampung sehingga pemekaran yang tidak semata terbatas pada perumusan pasal-pasal yang terkait dengan kelayakan, dan proses pemekaran tetapi juga kebijakan yang mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan Provinsi agar bisa maju.
2. Pemerintah harus mendistribusikan pendapatan daerah secara adil dan merata sehingga seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin dapat menikmati hasil pembangunan ekonomi demi kesejahteraan dan kemakmuran secara bersama.
3. Masyarakat harus bisa berusaha untuk menegentaskan kemiskinan dimulai dari diri sendiri dan keluarga dengan cara berwirausaha seperti yang dianjurkan oleh agama islam dengan dibantu dan didorong oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro rakyat miskin. Ada nya kesadaran akan menumbuhkan masyarakat yang kreatif, dan mampu bersaing.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz. *Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan Makro*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008.
- Abdul Hakim. "Analisis Dampak Pemekaran Daerah Ditinjau Dari Aspek Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pemekaran Kabupaten Kepulauan Maranti Dari Kabupaten Bengkalis)". *Jurnal JOM Fekon*, Vol. 4 No 1 (Februari 2017).
- Andi Rakasiwi. "Dampak Pemekaran Terhadap Pembangunan Daerah Di Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2010-2012". *Jom Fisip*, Vol.1 No.2 (Oktober 2014).
- Ari Yuniarti. "Pengaruh Pertumbuhan Pendapatan Perkapita, Tingkat Investasi dan Tingkat Industrialisasi Terhadap Kemandirian Daerah", (Skripsi Program Sarjana Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta 2008).
- A.Ubaedillah,dkk, *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Indonesia Center For Civic Education, 2000.
- Azyumardi Azra. *Demokrasi hak asasi manusia & Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media, 2000.
- Bismar Arianto dan Afrizal. "Fenomena Pemekaran Daerah di Provinsi Kepulauan Riau (Studi Pemekaran Daerah di Kabupaten Bintan)". *Jurnal Selat*, Vol. 1 No. 1 (Oktober 2013).
- Cica Sartika. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan". *Jurnal dan Makalah*, Vol 1 (April 2016).
- Definisi kemiskinan menurut BPS, <https://www.bps.go.id>, (04 April 2018).
- Djoko Harmanto. "Pemekaran Daerah Dan Konflik Keruangan Kebijakan Otonomi Daerah Dan Implementasinya Di Indonesia". *Jurnal Makara Sains*, Vol. 11 No. 1, (April 2007).
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Eko Oktah Supri Lariky. "Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Kecamatan Bangkinang Menurut Perspektif Ekonomi Islam", (Skripsi yang disusun untuk memperoleh gelar S1 pada Universitas Islam Negeri Sultan Kasim, Riau Pekanbaru 2012).
- Hasriani. "Studi Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Tafagapi Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali", (Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Halu Oleo Kendari, 2016).

- Hendra Esmara. *Perencanaan dan Pembangunan Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1986.
- Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti. "Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin", Bogor, 2008.
- Ida Ayu Purba Riani. "Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pendapatan Per Kapita, Kemiskinan Dan Ketimpangan Antarwilayah di Provinsi Papua". *Jurnal Bumi Lestari*, Volume 12 No. 1 (Februari 2012).
- Imam Al-Ghazali. Tanggung Jawab Sosial Ekonomi, [Http://elfryan.blogspot.com/kedudukan - pemerintah dalam pembangunan. html](http://elfryan.blogspot.com/kedudukan-pemerintah-dalam-pembangunan.html) (30 mei 2018).
- Ina Primiana. *Menggerakkan Sektor Rill UKM & Industri*. Bandung: Alfabeta, 2009
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah*, No. 32 Tahun 2004, LN No. 125 tahun 2004, TLN No. 4437.
- Irhandi Juanest Vant, *Daftar Inventarisasi Masalah Kabupaten Mesuji* "(On-Line), tersedia di ikbp-mesuji.blogspot.com", (24 Oktober 2018).
- Ishomuddin. *Sosiologi Perspektif Islam*. Malang: UMM Pres, 2005.
- J. Kaloh. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2007. dikutip oleh Eko Oktah Supri Lariky.
- Kbbi.web.id/dampak, (02 Februari 2018).
- Khalid, T.M. Otonomi Daerah: Tujuan Pemekaran dan penggabungan Daerah. <http://tengkumahesakhalid.blogspot.com>, (05 April 2018).
- Knowledgeisfree.blogspot.co.id makalah pengertian pemekaran wilayah. (05 April 2018).
- Komaruddin Hidayat dan Azyumardi Azra. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Jumanatul Ali Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004.
- Lincoln Arsyat. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2015.
- Ekonomi Pembangunan Edisi 5*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015
- Lampung Pagi.Com/ *Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Pringsewu Bukan Wacana htm*, (27 Oktober 2018).

- Lukman Santoso. "Problematisasi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia". *Sepermasi Hukum*, Vol. 1, No. 2 (Desember 2012).
- Lukman Santoso. "Implikasi Pemekaran Daerah Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Pasca Reformasi". *Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Volume 7, No 1 (April 2017).
- Marnis. *Pengantar Bisnis*. Pekanbaru : UNRIPress, 2007.
- Meilia Lovita, "Dampak Pemekaran Kabupaten Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Lampung Barat", (Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017).
- Michael P. Todaro. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* Edisi Keenam Jilid Pertama. Jakarta : Erlangga, 1997.
- Mohammad Sofyan. "Analisis Pengaruh Pendapatan Perkapita, Tingkat Suku Bunga, Jumlah Uang Beredar (M2) dan Inflasi Terhadap Jumlah Tabungan di Indonesia". (Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011).
- Mohd Kurniawan DP. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Di Kabupaten Musi Banyuasin (Studi Kasus Di Kecamatan Sungai Lilin)". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, Volume 8 No. 01 (Juli 2017).
- Muhamad Nur Rohani. "Kemiskinan Dalam Perspektif Sistem Ekonomi Islam". *Jurnal Dan Makalah*, Vol. 8 No.1 (Mei 2014).
- Murnlati. "Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pendapatan Perkapita Di Kabupaten Kerinci". *J-MAS* Vol.2 No.1 (April 2017).
- Nurul Huda. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta : Pranadamedia Gruop, 2015.
- Nur Rianto al Arif. *Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori Dan Analisis*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Ny. Arie Sukanti Hutagalung, Markus Gunawan. *Kewanangan Pemerintahan Di Bidang Pertahanan*. Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- P3EI UII Yogyakarta. *Ekonomi Islam*. Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
- Prima Sukmaraga. "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, PDRB Per kapita, dan Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jawa Tengah, (Skripsi Universitas Diponegoro, Semarang, 2011).
- Saeful Anwar. "Pemekaran Wilayah Bine Selatan". (Skripsi Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014).

Sejarah Lampung. (On-Line) [Http://Lampungprov.go.id/page/detail/sejarah-lampung.html](http://Lampungprov.go.id/page/detail/sejarah-lampung.html). (26 Januari 2018).

Siswanto Sunamo. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Statistik Daerah Provinsi Lampung 2016 “(Online), tersedia di <https://lampung.bps.go.id/publication/2016>, (23 maret 2018).

Subamo Hari. *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah Memadu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Suharmis Arikunto. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta, 2013.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D Cetakan ke-20*. Bandung : Alfabeta, 2014.

-----, *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2011.

-----, *Statistik Untuk Penelitian*, Bandung: CV Alfabet, 2007.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pembangunan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Tulus Tambunan. *Perekonomian Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Widjaja HAW. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002.

Winarna Surya Adisubrata. *Otonomi Daerah Di Era Reformasi*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP), 1999.

Wiratna Sujarweni. *Metodelogi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015.

W.J.S Poerwardarminta. *Kamus Besar Bahasa indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Yusnani Hasyimzoem, dkk. *Hukum Daerah*. Malang: CV. Cita Intrans Selaras Wisma Kalimetro, 2016.

L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1

PDRB Per Kapita Daerah Otonomi Baru Di Provinsi Lampung Tahun 2004-2007 dan Tahun 2013-2016 (Ribu Rp)

No	Tahun	DOB Pringsewu	DOB Mesuji	DOB Tulang Bawang Barat
1.	2004	3.772,88	6.121,94	6.121,94
2.	2005	4.235,95	7.182,23	7.182,23
3.	2006	4.845,36	8.442,77	8.442,77
4.	2007	5.757,90	10.224,39	10.224,39
	2008	Pemekaran Wilayah		
5.	2013	17.027,82	30.251,79	25.563,76
6.	2014	19.211,78	34.031,78	28.237,50
7.	2015	20.905,44	37.260,48	30.647,31
8.	2016	22.780,22	41.209,04	33.868,64

Sumber : *Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 2004-2016*

Lampiran 2

Penduduk Miskin Daerah Otonomi Baru Di Provinsi Lampung Tahun 2004-2007 dan Tahun 2013-2016 (Ribu Jiwa)

No	Tahun	DOB Pringsewu	DOB Mesuji	DOB Tulang Bawang Barat
1.	2004	-	-	-
2.	2005	167.30	122	122
3.	2006	181	106.10	106.10
4.	2007	188.20	103.60	103.60
	2008	Pemekaran Wilayah		
5.	2013	37.31	11.23	16.43
6.	2014	37.77	12.79	18.73
7.	2015	45.60	16	21.80
8.	2016	45.72	15.74	22.39

Sumber : *Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 2004-2016*

Lampiran 5

A. Statistik deskriptif PDRB Per Kapita Daerah Otonomi Baru

Hasil Deskriptif Statistik PDRB Perkapita Kabupaten Pringsewu

Statistics		
	Sebelum Pemekaran Wilayah	Sesudah Pemekaran Wilayah
N Valid	4	4
Missing	0	0
Mean	4.6522	19.9808
Std. Deviation	.85763	2.44998
Variance	.736	6.002
Minimum	3.77	17.03
Maximum	5.76	22.78

Sumber : Data Sekunder diolah tahun 2018

Hasil Deskriptif Statistik PDRB Perkapita Kabupaten Mesuji

Statistics		
	Sebelum Pemekaran Wilayah	Sesudah Pemekaran Wilayah
N Valid	4	4
Missing	0	0
Mean	7.9922	35.6878
Std. Deviation	1.76456	4.66402
Variance	3.114	21.753
Minimum	6.12	30.25
Maximum	10.22	41.21

Sumber : Data Sekunder diolah tahun 2018

**Hasil Deskriptif Statistik
PDRB Perkapita Kabupaten Tulang Bawang Barat**

Statistics			
		Sebelum Pemekaran Wilayah	Sesudah Pemekaran Wilayah
N	Valid	4	4
	Missing	0	0
Mean		7.9922	29.5788
Std. Deviation		1.76456	3.53390
Variance		3.114	12.488
Minimum		6.12	25.56
Maximum		10.22	33.87

Sumber : Data Sekunder diolah tahun 2018

Statistik deskriptif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan data dilihat dari nilai minimum, maksimum, mean, standar deviasi dan variance.

B. Statistik deskriptif Kemiskinan Daerah Otonomi Baru

**Hasil Deskriptif Statistik
Kemiskinan Kabupaten Pringsewu**

Statistics			
		Sebelum Pemekaran Wilayah	Sesudah Pemekaran Wilayah
N	Valid	3	4
	Missing	1	0
Mean		178.8333	41.6000
Std. Deviation		10.61712	4.69210
Variance		112.723	22.016
Minimum		167.30	37.31
Maximum		188.20	45.72

Sumber : Data Sekunder diolah tahun 2018

Hasil Deskriptif Statistik Kemiskinan Kabupaten Mesuji

Statistics			
		Sebelum Pemekaran Wilayah	Sesudah Pemekaran Wilayah
N	Valid	3	4
	Missing	1	0
Mean		110.5667	13.9400
Std. Deviation		9.98015	2.32022
Variance		99.603	5.383
Minimum		103.60	11.23
Maximum		122.00	16.00

Sumber : Data Sekunder diolah tahun 2018

Hasil Deskriptif Statistik Kemiskinan Kabupaten Tulang Bawang Barat

Statistics			
		Sebelum Pemekaran Wilayah	Sesudah Pemekaran Wilayah
N	Valid	3	4
	Missing	1	0
Mean		110.5667	19.8375
Std. Deviation		9.98015	2.78114
Variance		99.603	7.735
Minimum		103.60	16.43
Maximum		122.00	22.39

Sumber : Data Sekunder diolah tahun 2018

Statistik deskriptif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan data dilihat dari nilai minimum, maksimum, mean, standar deviasi dan variance.

C. Uji Normalitas PDRB Per Kapita Daerah Otonomi Baru

Hasil Uji Normalitas PDRB Perkapita Kabupaten Pringsewu

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	0,596
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,869

Sumber : Data Sekunder diolah tahun 2018

Hasil Uji Normalitas PDRB Perkapita Kabupaten Mesuji

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	0,561
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,911

Sumber : Data Sekunder diolah tahun 2018

Hasil Uji Normalitas PDRB Perkapita Kabupaten Tulang Bawang Barat

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	0,479
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,976

Sumber : Data Sekunder diolah tahun 2018

Dilihat dari nilai *Asymp. Sig.(2-tailed)* harus di atas 0,05, maka data terdistribusi normal.

D. Uji Normalitas Kemiskinan Daerah Otonomi Baru

Hasil Uji Normalitas Kemiskinan Kabupaten Pringsewu

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	0,552
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,920

Sumber : Data Sekunder diolah tahun 2018

Hasil Uji Normalitas
Kemiskinan Kabupaten Mesuji

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	0,388
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,998

Sumber : Data Sekunder diolah tahun 2018

Hasil Uji Normalitas
Kemiskinan Kabupaten Tulang Bawang Barat

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	0,388
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,998

Sumber : Data Sekunder diolah tahun 2018

Dilihat dari nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* harus di atas 0,05, maka data terdistribusi normal.

E. Paired Sample T-Test PDRB Per Kapita Daerah Otonomi Baru

Hasil Uji Paired Sample T-Test
PDRB Perkapita Kabupaten Pringsewu

Paired Samples Test

	Paired Differences					T	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Sebelum Pemekaran Wilayah - Sesudah Pemekaran Wilayah	-1.53285E1	1.61556	.80778	-17.89921	-12.75779	-18.976	3	.000

Sumber : Data Sekunder diolah tahun 2018

**Hasil Uji *Paired Sample T-Test*
PDRB Perkapita Kabupaten Mesuji**

Paired Samples Test

	Paired Differences					T	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Sebelum Pemekaran Wilayah - Sesudah Pemekaran Wilayah	-2.76955E1	2.91606	1.45803	-32.33560	-23.05540	-18.995	3	.000

Sumber : Data Sekunder diolah tahun 2018

**Hasil Uji *Paired Sample T-Test*
PDRB Perkapita Kabupaten Tulang Bawang Barat**

Paired Samples Test

	Paired Differences					T	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Sebelum Pemekaran Wilayah - Sesudah Pemekaran Wilayah	-2.15865E1	1.77925	.88963	-24.41769	-18.75531	-24.265	3	.000

Sumber : Data Sekunder diolah tahun 2018

Dilihat dari nilai sig. (2-tailed) < 0,05 maka ada perbedaan yang signifikan antara PDRB Perkapita Daerah Otonomi Baru di Provinsi Lampung sebelum dan sesudah pemekaran wilayah.

F. Paired Sample T-Test Kemiskinan Daerah Otonomi Baru

Hasil Uji *Paired Sample T-Test* Kemiskinan Kabupaten Pringsewu

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Sebelum Pemekaran Wilayah - Sesudah Pemekaran Wilayah	1.35803E2	6.48441	3.74378	119.69515	151.91151	36.274	2	.001

Sumber : Data Sekunder diolah tahun 2018

Hasil Uji *Paired Sample T-Test* Kemiskinan Kabupaten Mesuji

Paired Samples Test

	Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
				Lower	Upper			
Pair 1 Sebelum Pemekaran Wilayah - Sesudah Pemekaran Wilayah	9.57233E1	11.73337	6.77427	66.57602	124.87065	14.130	2	.005

Sumber : Data Sekunder diolah tahun 2018

**Hasil Uji *Paired Sample T-Test*
Kemiskinan Kabupaten Tulang Bawang Barat**

Paired Samples Test

		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower				Upper
Pair 1	Sebelum Pemekaran Wilayah - Sesudah Pemekaran Wilayah	8.95933E1	11.94468	6.89627	59.92110	119.26557	12.992	2	.006

Sumber : Data Sekunder diolah tahun 2018

Dilihat dari nilai sig. (2-tailed) < 0,05 maka ada perbedaan yang signifikan antara Kemiskinan Daerah Otonomi Baru di Provinsi Lampung sebelum dan sesudah pemekaran wilayah.



Lampiran 3

Wilayah	PDRB Per Kapita Daerah Otonomi Baru Tahun 2004-2016 (Ribu Rp.)												
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lampung Barat	3 311,72	3 690,01	4 071,06	4 944,40	5 496,68	6 146,30	6 743,88	13 101,19	13 210,39	14 452,54	16 038,29	17 490,83	19 083,92
Tanggamus	3 772,88	4 235,95	4 845,36	5 757,90	4 095,43	7 917,20	8 977,99	13 277,10	14 913,74	16 133,24	17 986,36	19 905,37	21 241,67
Lampung Selatan	4 319,46	4 521,73	5 558,66	6 398,37	8 459,74	9 879,18	11 192,85	22 286,19	24 424,70	26 555,78	29 388,43	32 340,25	35 511,43
Lampung Timur	5 466,33	6 415,64	6 847,86	7 640,43	8 702,08	9 476,60	11 059,67	22 654,81	24 249,46	27 086,62	29 573,29	31 046,08	32 188,08
Lampung Tengah	5 194,79	5 726,03	6 691,62	7 923,52	9 648,49	11 749,70	14 222,40	27 544,16	30 038,35	32 584,36	36 152,17	39 377,01	44 121,30
Lampung Utara	5 411,75	6 246,48	7 022,96	8 557,74	9 693,88	11 400,97	13 950,05	19 372,81	20 969,47	22 768,76	25 554,09	27 901,29	30 785,92
Way Kanan	3 463,05	4 034,70	4 629,33	5 596,90	5 531,37	6 324,42	7 388,07	16 441,58	17 881,72	19 158,23	21 404,20	23 213,76	25 270,90
Tulang Bawang	6 121,94	7 182,23	8 442,77	10 224,39	12 609,28	12 231,67	14 2688,85	26 922,56	28 753,15	31 745,87	35 258,67	39 631,62	41 349,20
Pesawaran	-	-	5 426,92	6 456,89	8 591,82	10 448,78	12 866,03	19 579,12	21 238,34	23 221,31	25 732,77	29 264,00	29 825,45
Pringsewu	-	-	-	-	-	6 973,96	8 110,47	14 327,91	15 696,97	17 027,82	19 211,78	20 905,44	22 780,22
Mesuji	-	-	-	-	-	14 067,16	15 704,07	25 817,68	28 024,13	30 251,79	34 031,78	37 260,48	41 209,04
Tulang Bawang Barat	-	-	-	-	-	10 466,91	12 841,20	21 537,20	23 648,79	25 563,76	28 237,50	30 647,31	33 868,64
Pesisir Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	16 436,26	17 664,66	19 689,96	22 200,67	23 727,17
Bandar Lampung	7 575,34	8 561,48	10 421,95	12 868,25	15 921,48	19 630,35	22 042,58	27 511,28	30 063,50	32 770,59	36 779,66	39 997,44	44 843,79
Metro	3 949,54	4 570,91	5 063,55	5 729,05	6 291,60	7 159,50	8 031,29	19 124,21	21 118,46	23 013,79	25 669,07	27 427,47	31 092,90
Provinsi Lampung	5 098,64	5 748,42	6 811,12	8 357,19	9 911,95	11 816,31	14 244,58	21,981,47	23 910,84	25 768,94	28 776,87	31 188,15	34 260,61

Lampiran 4

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Jiwa)												
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Lampung Barat	-	96.80	96.20	96.70	96.70	79.48	71.80	67.88	65.23	60.81	60.27	42.20	44.90
Tanggamus	-	167.30	181	188.20	188.20	174.93	98.10	92.75	89.36	85.64	85.02	81.60	81.34
Lampung Selatan	-	329.20	364.50	371.80	371.80	222.53	188	177.74	171.41	162.97	161.79	157.70	158.38
Lampung Timur	-	248.40	256.20	261.90	261.90	206.28	200.40	189.46	182.21	172.21	170.73	170.10	172.61
Lampung Tengah	-	228.20	252.72	263	263	230.66	197.80	187	180.23	162.81	161.55	164.40	165.67
Lampung Utara	-	182.50	181.20	185.30	185.30	171.05	164.80	155.81	149.95	142.01	140.73	140.40	139.50
Way Kanan	-	108.40	94.60	96.80	96.80	79.22	76.70	72.51	69.37	65.18	64.50	63.10	63.64
Tulang Bawang	-	122	106.10	103.60	103.60	86.80	43.10	40.75	38.95	33.72	36.83	44.20	44.26
Pesawaran	-	-	-	-	-	100.86	81.50	77.05	74.26	74.60	74.01	75.40	74.45
Pringsewu	-	-	-	-	-	-	45.50	43.02	41.42	37.31	37.77	45.60	45.72
Mesuji	-	-	-	-	-	-	16.20	15.32	14.74	11.23	12.79	16	15.74
Tulang Bawang Barat	-	-	-	-	-	-	19.10	18.06	17.35	16.43	18.73	21.80	22.39
Pesisir Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	24.20
Bandar Lampung	-	81.20	89.90	78.80	78.80	123.90	128.60	121.58	117.35	102.75	102.27	100.80	100.54
Metro	-	8.60	15.50	15.50	15.50	21.22	20.10	19	18.34	17.08	16.95	16.20	16.26
Provinsi Lampung	-	1572.60	1638.80	1661.70	1661.70	1558.28	1479.93	1277.93	1230.16	1144.76	1143.93	1163.50	1169.60



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR 09 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran dan memberikan masukan serta wawasan bagi mahasiswa yang sedang menyelesaikan penulisan skripsi perlu ditunjuk dan ditetapkan Dosen Pembimbing Skripsi;
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini di pandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas bimbingan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 383 tahun 1999 Tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1);
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 13 tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Intan Bandar Lampung;
5. Peraturan Menteri Agama RI No.32 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama No.12 tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung;
6. Keputusan Menteri Agama RI No. 35 tahun 2014 Tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung;
7. Keputusan Rektor UIN Raden Intan Bandar Lampung Nomor 255 tahun 2015 Tentang Pedoman Akademik UIN Raden Intan Lampung.
8. Surat Pengelahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran UIN Raden Intan Lampung Tahun 2016, Nomor: SP.DIPA-025.04.4.424260/2017 Tanggal 07 Desember 2016
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung tanggal 16 Maret 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018**
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa yang namanya tercantum dalam kolom 5 (lima) lampiran Keputusan ini;

- Kedua : Dalam melaksanakan tugas hendaknya Pembimbing memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pembimbing I agar lebih menekankan bimbingannya pada aspek materi/substansi permasalahan yang dikaji, sedangkan Pembimbing II lebih menekankan bimbingannya pada aspek metodologi, masing-masing dengan tanpa mengenyampingkan antara aspek satu dari aspek lainnya;
 - b. Redaksi judul dapat dirubah sepanjang tidak merubah inti permasalahan;
 - c. Penyusunan skripsi mengacu pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah/Skripsi UIN Raden Intan Lampung yang berlaku.
- Ketiga : Pembimbing diberi honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab;
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan dibetulkan dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 19 Maret 2018

DEKAN,



Moh. Bahrudin

Tembusan Yth:

- 1. Rektor UIN Raden Intan Lampung;
- 2. Kepada Biro AUAK UIN Raden Intan Lampung



LAMPIRAN:
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
ISLAM UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 09 TAHUN 2018
TANGGAL : 19 MARET 2018
TENTANG : PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018

NO	NAMA DOSEN	GOL	JABATAN	NAMA MAHASISWA	N P M	JUR
1	2	3	4	5	6	7
1	Prof. Dr. H. Suharto, S.H., M.A.	IV/e	Pembimbing I Pembimbing I	Ani Bresti Muspita Dwi Puspita Sari	1451010011 1451010171	EI EI
2	Drs. Nasruddin, M.Ag.	IV/b	Pembimbing I Pembimbing I Pembimbing I	Muhammad Mulyadi Pepy Tiara Shanti Indri Andesta D.	1451010081 1151010029 1451010050	EI EI EI
3	Dr. Tulus Suryanto, M.M., Akt., C.A.	IV/b	Pembimbing I	Juniarsih	1451010199	EI
4	Hanif, S.E., M.M.	IV/a	Pembimbing I Pembimbing I Pembimbing I Pembimbing I	Sudarni Chomsyatun Yuli Astuti Aldea Rosa Yuli Astria	1451010256 1451010136 1451010146 1451010135	EI EI EI EI
5	Madnasir, S.E., M.S.I.	IV/a	Pembimbing I Pembimbing I Pembimbing I Pembimbing I	Jheniar Evriliany Akmel Siti Maisyaroh Ridho Diana Juliana	1451010061 1451010118 1451010238 1451010198	EI EI EI EI
6	Ahmad Habibi, S.E., M.E.	III/d	Pembimbing I Pembimbing I Pembimbing I Pembimbing I Pembimbing I	Tri Yuniarti Rusandi Peti Sahrantan Pitri Windi Risti Anindia Lisa Aprilia Indah Apriliani	1451010127 1451010229 1451010267 1451010202 1451010052	EI EI EI EI EI
7	Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag	III/d	Pembimbing I	Rizka Dwi Astuti	1451010102	EI
8	Hj. Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I.	III/d	Pembimbing I Pembimbing I Pembimbing I Pembimbing I	Rahayu Ratna Sari Isnaini susbadiyah Meli dwi saputri Suty Lestari	1451010233 1451010059 1451010077 1451010260	EI EI EI EI
9	Vitria Susanti, S.E., M.Ec.Dev.	III/b	Pembimbing I Pembimbing I Pembimbing I	Dian Kurniawan Dwi Endriani Eriska Nur Oktabriani	1451010066 1451010169 1451010178	EI EI EI
10	Evi Ekawati, S.E., M.Si.	III/d	Pembimbing I Pembimbing I	Alfi Nuan Sari Meli Purnamasari	1451010147 1351010199	EI EI
11	Any Eliza, S.E., M.Ak.	III/d	Pembimbing I Pembimbing I	Septiana Nabila Tri Widodo	1451010113 1451010125	EI EI
12	Budimansyah, M.Kom.I.	III/c	Pembimbing I	Khoirul Ummam	1351010264	EI
13	Femei Purnamasari, S.E., M.Si.	III/b	Pembimbing II Pembimbing II	Septiana Nabila Suty Lestari	1451010113 1451010260	EI EI
14	Deki Firmansyah, S.E., M.Si.	III/b	Pembimbing II	Yuli Astuti	1451010136	EI
15	M. Kurniawan, S.E.I., M.Si.	III/b	Pembimbing II Pembimbing II Pembimbing II	Dian Kurniawan Meli Purnamasari Muhammad Mulyadi	1451010066 1351010199 1451010081	EI EI EI
16	Fatih Fuadi, S.E., M.S.I.	III/b	Pembimbing II Pembimbing II	Juniarsih Rahayu Ratna Sari	1451010199 1451010233	EI EI
17	Muhammad Iqbal, S.E.I., M.E.I.	III/b	Pembimbing II Pembimbing II	Ridho Diana Juliana	1451010238 1451010198	EI EI
18	Yulistia Devi, S.E., M.S.Ak.	III/b	Pembimbing II Pembimbing II	Jheniar Evriliany Akmel Rizka Dwi Astuti	1451010061 1451010102	EI EI
19	Suhendar, S.E., M.S.Ak., Akt.	III/b	Pembimbing II Pembimbing II Pembimbing II	Windi Risti Anindia Ani Bresti Muspita Dwi Puspita Sari	1451010267 1451010011 1451010171	EI EI EI
20	Okta Supriyaningsih, S.E., M.E.Sy.	III/b	Pembimbing II Pembimbing II	Aldea Rosa Indri Andesta D.	1451010146 1451010050	EI EI
21	Ahmad Hazas Syarif, S.E.I., M.E.I.	III/b	Pembimbing II	Pepy Tiara Shanti	1151010029	EI

22	Dedi Satriawan M.Pd	III/b	Pembimbing II	Siti Maisyarah	1451010118	EI
23	Gustika Nurmalia M.EK	III/b	Pembimbing II Pembimbing II	Tri Yuniarti Rusandi Peti Sahrintan Pitri	1451010127 1451010229	EI EI
24	Ulul Azmi, S.E.I., M.S.I	III/b	Pembimbing II	Sudarni Chomsyatun	1451010256	EI
25	Agus Kurniawan, S.E., M.S.Ak.	III/b	Pembimbing II Pembimbing II	Lisa Aprilia Indah Apriliani	1451010202 1451010052	EI EI
26	Nur Wahyu Ningsih, M.S.Ak	III/b	Pembimbing II Pembimbing II	Tri Widodo Alfi Nuan Sari	1451010125 1451010147	EI EI
27	Sintha Ayu M.S.I	III/b	Pembimbing II Pembimbing II	Dwi Endriani Khoirul Ummam	1451010169 1351010264	EI EI
28	Liya Ermawati, S.E.,M.S.Ak	III/b	Pembimbing II Pembimbing II	Isnaini susbadiyah Meli dwi saputri	1451010059 1451010077	EI EI
29	Is Susanto, ME.E.Sy	III/b	Pembimbing II	Eriska Nur Oktabriani	1451010178	EI
30	Yeni Susanti, M.A	III/b	Pembimbing II	Yuli Astria	1451010135	EI

Dekan,



Mon. Bahrudin

